



**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS DAN REPUTASI AUDITOR
TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO
DENGAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Atik Nur Fajar Yanti
NIM 7211416048**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada sidang skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto, SE., Msi., CMA., CIBA., CERA

NIP. 198309012008121002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Agung Yulianto, S.Pd., M.Si

NIP. 197407072003121002

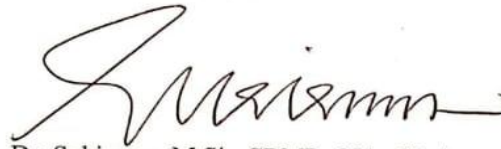
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juni 2020

Penguji I



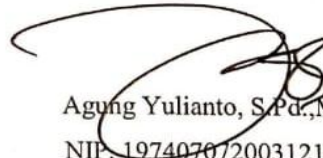
Dr. Sukirman, M.Si., CRMP.,QIA.,CFrA
NIP. 196706111991031003

Penguji II



Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Ak.,
CA., QIA., CRMP
NIP. 198212142008122001

Penguji III



Agung Yulianto, S.Pd., M.Si
NIP. 197407072003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heni Yanto, M.B.A., Ph.D

NIP. 196307181987021001

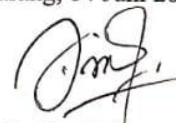
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Nur Fajar Yanti
NIM : 7211416048
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 30 Agustus 1998
Alamat : Desa Kertasari RT.04 RW.01 Kec. Suradadi Kab.
Tegal

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 04 Juni 2020



Atik Nur Fajar Yanti

NIM. 7211416048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”
(QS. Al-Insyirah 94: 6-7).

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua tercinta (Bapak Taroni dan Ibu Mukharoroh) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa dan dukungan.
- ❖ Kedua adikku (Ahmad Fahrul Rozi dan Elvira Ramadhani) tercinta yang memberikan semangat dan doa.
- ❖ Mohamad Nurjen Ismail, S.AK yang selalu memberikan dukungan dan doa.
- ❖ Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
- ❖ Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Komite Manajemen Risiko sebagai Variabel Moderating” sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA.,PhD., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas untuk mengikuti program akuntansi S1 Fakultas Ekonomi.
3. Kiswanto, S.E.,M.Si.,CMA.,CIBA.,CERA., Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik selama menempuh pendidikan.
4. Agung Yulianto, S.Pd.,M.Si., Pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan dan saran yang mendukung selama proses penulisan skripsi ini.

5. Dr. Sukirman, M.Si., CRMP.,QIA.,CFrA., penguji pertama yang telah berkenan menguji skripsi ini.
6. Dhini Suryandari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,QIA.,CRMP., penguji kedua yang telah berkenan menguji skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas bimbingan, bantuan dan kesabaran dalam memberikan ilmu.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pahala atas semua jasa yang Bapak/Ibu berikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

SARI

Yanti, Atik. 2020. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Komite Manajemen Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Agung Yulianto, S.Pd.,M.si.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Reputasi Auditor, Komite Manajemen Risiko, Pengungkapan Manajemen Risiko.

Pengungkapan manajemen risiko ialah upaya perusahaan untuk menginformasikan kepada pengguna laporan tahunan tentang apa yang menjadi ancaman perusahaan. Informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko dapat digunakan oleh *stakeholder* sebagai faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi perusahaan pengungkapan manajemen risiko dapat membantu mengontrol aktivitas manajemen, yaitu dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan pada laporan keuangan. Pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur masih bersifat sukarela. Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko dengan komite manajemen risiko sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 189 unit analisis, namun terdapat 27 data *outlier* sehingga menjadi 162 unit analisis yang diolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan dewan komisaris independen dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Komite manajemen risiko memperlemah pengaruh antara dewan komisaris, komisaris independen dan reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko. Komite manajemen risiko tidak mampu memoderasi pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Saran bagi investor sebagai referensi untuk menjadi pertimbangan dengan melihat variabel ukuran perusahaan dalam pemilihan perusahaan yang akan dijadikan untuk menanamkan modalnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan agar memperluas sampel perusahaan seperti seluruh perusahaan non keuangan.

ABSTRACT

Yanti, Atik. 2020. "The Influence of Firm Size, Characteristics of the Board of Commissioners and the Auditor's Reputation on Risk Management Disclosure with the Risk Management Committee as a Moderating Variable". Essay Accounting Major. Faculty of Economics. Semarang State University. Author I. Agung Yulianto, S.Pd., M, si.

Keywords: Firm Size, Board of Commissioners, Independent Board of Commissioners, Auditor Reputation, Risk Management Committee, Risk Management Disclosure.

Risk management disclosure is the company's effort to inform users of annual reports about what is a company's threat. Information regarding risk management disclosures can be used by stakeholders as a consideration in investment decision making. For companies risk management disclosure can help control management activities, which can minimize the occurrence of fraudulent practices in financial statements. Risk management disclosure in manufacturing companies is still voluntary. This study will examine the factors that influence the risk management disclosure with the risk management committee as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016-2018.

The population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2018. The sample selection is done using the purposive sampling method and produces 189 analysis units, but there are 27 outlier data so that 162 analysis units are processed.

Research results show that the size of the company and the board of commissioners have a significant positive effect on risk management disclosure. Whereas the independent board of commissioners and the auditor's reputation do not affect the disclosure of risk management. The risk management committee weakens the influence between the board of commissioners, independent commissioners and the auditor's reputation on risk management disclosures. The risk management committee is not able to moderate the influence between company size and risk management disclosure. Suggestions for investors as a reference to be considered by looking at company size variables in the selection of companies that will be used to invest their capital. Companies with larger sizes will disclose broader risk management information. Future studies are expected to expand the sample of companies such as all non-financial companies.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.3 Cakupan Masalah	17
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan Penelitian.....	19
1.6 Manfaat Penelitian.....	20
1.6.1 Manfaat Teoritis	20
1.6.2 Manfaat Praktis	21
1.7 Orisinilitas Penelitian	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	22

2.1	Kajian Teori Utama	22
2.1.1	Teori Agensi.....	22
2.1.2	Teori Sinyal.....	25
2.2	Kajian Variabel Penelitian.....	27
2.2.1	Pengungkapan Manajemen Risiko	27
2.2.1.1	Manajemen Risiko.....	27
2.2.1.2	Definisi dan Konsep Pengungkapan Manajemen Risiko	29
2.2.1.3	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko	32
2.2.2	Ukuran Perusahaan.....	34
2.2.3	Dewan Komisaris	35
2.2.4	Dewan Komisaris Independen	38
2.2.5	Reputasi Auditor	42
2.2.6	Komite Manajemen Risiko	44
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu	45
2.4	Kerangka Berfikir.....	55
2.4.1	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	55
2.4.2	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	57
2.4.3	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	58
2.4.4	Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	59
2.4.5	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.....	61

2.4.6	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.....	62
2.4.7	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko....	65
2.4.8	Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.....	67
2.5	Hipotesis Penelitian	71
BAB III METODE PENELITIAN		72
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	72
3.2	Populasi dan Sampel	73
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	74
3.3.1	Variabel Dependen.....	74
3.3.2	Variabel Independen	75
3.3.3	Variabel Moderating	78
3.4	Metode Analisis Data	78
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	78
3.4.2	Analisis Statistik Inferensial	79
3.4.2.1	Metode Regresi Variabel Moderating	79
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	80
3.4.4	Uji Hipotesis	82
3.4.4.1	Uji Simultan (Uji F)	82
3.4.4.2	Uji Parsial (Uji t)	83
3.4.4.3	Koefisien Determinasi (Adjusted R-Squared).....	83
3.4.4.4	Koefisien Determinasi Parsial (r^2).....	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		85

4.1	Hasil Penelitian.....	85
4.1.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	85
4.1.1.1	Pengungkapan Manajemen Risiko	85
4.1.1.2	Ukuran Perusahaan.....	88
4.1.2.3	Dewan Komisaris	90
4.1.2.4	Dewan Komisaris Independen.....	91
4.1.2.5	Reputasi Auditor.....	93
4.1.2.6	Komite Manajemen Risiko.....	94
4.1.2	Analisis Statistik Inferensial	96
4.1.2.1	Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	96
4.1.3	Uji Asumsi Klasik.....	99
4.1.3.1	Uji Normalitas	99
4.1.3.2	Uji Multikolinearitas	100
4.1.3.3	Uji Autokorelasi	101
4.1.3.4	Uji Heterokedastisitas.....	102
4.1.4	Uji Hipotesis	103
4.1.4.1	Uji Simultan (Uji F)	103
4.1.4.2	Uji Parsial (Uji t)	104
4.1.4.3	Koefisien Determinasi (Adjusted R-Squared).....	107
4.1.4.4	Koefisien Determinasi Parsial (r^2).....	108
4.2	Pembahasan	111
4.2.1	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	111
4.2.2	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	113

4.2.3	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	114
4.2.4	Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	116
4.2.5	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.	119
4.2.6	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.	119
4.2.7	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko... ..	121
4.2.8	Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.	124
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		126
5.1	Simpulan.....	126
5.2	Keterbatasan dan Saran	127
DAFTAR PUSTAKA		129
LAMPIRAN.....		134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pengungkapan Manajemen Risiko	6
Tabel 2.1 Item Pengungkapan Manajemen Risiko	31
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	50
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	74
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ERM	86
Tabel 4.2 Hasil Distribusi Frekuensi Pengungkapan Manajemen Risiko.....	87
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Firm Size	88
Tabel 4.4 Hasil Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan	89
Tabel 4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Dewan Komisaris	90
Tabel 4.6 Hasil Statistik Distribusi Frekuensi Dewan Komisaris.....	91
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Dewan Komisaris Independen	92
Tabel 4.8 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Dewan Komisaris Independen	93
Tabel 4.9 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Reputasi Auditor	93
Tabel 4.10 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi KMR	95
Tabel 4.11 Hasil Uji Moderated Regression Analysis	96
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	100
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	101
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi	101
Tabel 4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	103
Tabel 4.16 Hasil Uji F.....	104
Tabel 4.17 Simpulan Uji Hipotesis	107
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	108
Tabel 4.19 Koefisien Determinasi Parsial.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	70
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan.....	135
Lampiran 2 Item Pengungkapan Manajemen Risiko	137
Lampiran 3 Daftar Kantor Akuntan Publik.....	138
Lampiran 4 Uji Hipotesis	139
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	141
Lampiran 6 Hasil Uji Moderated Regression Analysis	142
Lampiran 7 Analisis Statistik Deskriptif.....	143
Lampiran 8 Tabulasi Penelitian	146

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan di Indonesia terutama yang telah *go public* wajib menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemegang saham atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Laporan tahunan terdiri dari komponen keuangan dan non keuangan. Komponen non keuangan menyediakan informasi tambahan bagi *stakeholder* termasuk risiko perusahaan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik).

Perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi keuangan dan *non* keuangan (Syifa, 2013). Menurut Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) peningkatan *corporate governance* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko perusahaan. Dengan cara ini, kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan

meningkat karena informasi yang disampaikan tidak hanya informasi terkait keuangan tetapi juga pengungkapan informasi terkait risiko perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan *corporate governance* dapat dilakukan dengan cara penerapan manajemen risiko .

Manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mencegah terjadinya risiko dalam perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko perusahaan pada setiap kegiatan, mengukur dan mengatasinya pada level toleransi tertentu (Gunawan dan Zakiyah, 2017). Manajemen risiko dimulai dari adanya kesadaran manajemen bahwa risiko itu ada di dalam perusahaan. Dengan adanya risiko dalam setiap kegiatan usaha, perusahaan dituntut untuk mampu mengendalikan dan memberikan solusi sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko agar tidak merugikan perusahaan dan para investor. Kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko ini diharapkan dapat mengurangi dampak risiko atau bahkan menghilangkannya (Syifa, 2013). Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya. Perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko dengan cara pengungkapan risiko atau *risk management disclosure* (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016).

Dalam PSAK No. 60 (Revisi 2017) tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, disebutkan bahwa informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko dari instrumen keuangan harus diungkapkan. Pengungkapan informasi tersebut berupa

pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko, serta metode pengukuran risiko. Sedangkan dalam pengungkapan kuantitatif, perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan sedikitnya risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk membuat analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar (Wicaksono dan Adiwibowo, 2017).

Pengungkapan manajemen risiko sendiri adalah salah satu penerapan dari *good corporate governance* yang disajikan dalam bagian tata kelola perusahaan dalam *annual report* sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan pada Emiten atau Perusahaan Publik bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Menurut Dewi (2017) mengemukakan bahwa pengungkapan risiko merupakan suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan (perusahaan dan *stakeholder*) tentang apa yang mengancam perusahaan. Informasi mengenai pengungkapan risiko ini juga dapat digunakan oleh *stakeholder* sebagai faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi perusahaan pengungkapan manajemen risiko dapat membantu mengontrol aktivitas manajemen yaitu dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan pada laporan keuangan. Karena itu pengungkapan manajemen risiko harus diungkapkan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya agar

stakeholder dan pemakai informasi lainnya tidak keliru dalam mengambil keputusan investasi.

Kurangnya informasi non keuangan dapat menyesatkan investor dalam proses membuat keputusan investasi. Abdullah (2015) mengemukakan bahwa investor membuat keputusan investasi atau penarikan investasi dengan cara mengevaluasi kembali terkait dengan tingkat risiko suatu perusahaan. Jika investor gagal untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama yang sebenarnya dari perusahaan, investor tidak bisa menilai tingkat risiko yang sebenarnya terjadi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan menyebabkan investor salah dalam membuat keputusan investasi yang bisa berakhir di sebuah kerugian besar.

Kasus yang terjadi pada perusahaan Garuda Indonesia, PT Hanson pada tahun 2019, PT Kimia Farma pada tahun 2009 dan perusahaan Enron & Worldcom adalah contoh dimana perusahaan tersebut melakukan pelanggaran kode etik dan memanipulasi laporan keuangan. Dari kasus tersebut menyebabkan kepercayaan dari para investor dan pengguna laporan keuangan terhadap pengungkapan laporan keuangan menurun. Laporan keuangan dianggap hanya disusun sesuai dengan standar dan aturan akuntansi yang berlaku, tetapi tidak memberikan gambaran yang sesuai dan akurat tentang kondisi suatu perusahaan. Peristiwa tersebut merupakan contoh perusahaan karena tidak memiliki *corporate governance* yang baik serta adanya kelemahan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya, sehingga dapat membantu para pengambil

keputusan seperti investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya dalam membuat keputusan investasi.

Pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan non keuangan masih bersifat sukarela, sehingga luas pengungkapan manajemen risiko tidak merata. Perbedaan luas pengungkapan manajemen risiko dalam *annual report* terjadi juga karena karakteristik antar perusahaan yang berbeda. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di asia, perkembangannya dipantau oleh banyak investor dari seluruh dunia. Hal ini dikarenakan indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia karena sumber daya yang melimpah. Perusahaan manufaktur menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, karena memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia selain itu perusahaan manufaktur sebagai salah satu penopang perekonomian nasional karena memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (www.sindonews.com diakses pada tanggal 5 September 2019).

Perusahaan manufaktur mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan, baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lain. Sebenarnya setiap perusahaan pasti memiliki peluang menghadapi risiko, namun risiko yang dihadapi pada industri manufaktur lebih kompleks karena tidak terlepas dari karakteristik utama kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan memperoleh, mengolah sumber daya menjadi barang jadi serta menyimpan dan mendistribusikan barang tersebut. Hal tersebutlah yang menjadikan perusahaan manufaktur memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lainnya (Dewi, 2017). Perusahaan non

keuangan yang termasuk didalamnya adalah perusahaan manufaktur dalam hal pengungkapan manajemen risiko hanya sekedar pada himbauan saja. Kelonggaran ketentuan pengungkapan risiko pada perusahaan non keuangan menjadikannya cenderung untuk hanya menyajikan informasi risiko secara umum dan kurang terperinci. Pada kenyataannya, tingkat pengungkapan manajemen risiko di Indonesia belum dilakukan secara maksimal khususnya pada perusahaan manufaktur. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang diringkas dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Tingkat Pengungkapan Manajemen Risiko

No	Nama Peneliti	ERM	Objek
1.	Oka Aditia dan Prima (2017)	14,60	Manufaktur di BEI Tahun 2012-2014
2.	Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan (2016)	74,98	Manufaktur di BEI Tahun 2012-2014
3.	Iin Manis Maidatul Jannah (2016)	71,35	Manufaktur di BEI Tahun 2012-2014
4.	Latifah Yunifa dan Agung Juliarto (2017)	39,16	Manufaktur di BEI Tahun 2014
5.	Widiawati dan Halmawati (2018)	68,18	Manufaktur di BEI Tahun 2014-2017
6.	Aubert Kencana dan Hexana Sri Lastanti (2018)	47,84	Manufaktur di BEI Tahun 2015-2016
7.	Nadia Ulfa (2018)	28,15	Manufaktur di BEI Tahun 2015-2017

Sumber : Jurnal penelitian terdahulu

Tabel 1.1 menunjukkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2017. Penelitian yang dilakukan oleh Aditia dan Prima (2017) menunjukkan tingkat pengungkapan manajemen risiko pada tahun 2012-2014 berada pada tingkat terendah yaitu 14,60%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih

dan Gunawan (2016) pada tahun 2012-2014 menunjukkan tingkat pengungkapan manajemen risiko yang tertinggi yaitu sebesar 74,98%.

Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016) pada tahun 2012-2014, menunjukkan pengungkapan manajemen risiko yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,35%. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunifa dan Julianto (2017) pada tahun 2014, menunjukkan sebesar 39,16.

Penelitian yang dilakukan oleh Widhiawati dan Halmawati (2018) pada perusahaan manufaktur tahun 2014-2017 memiliki tingkat pengungkapan manajemen risiko sebesar 68,18%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) menunjukkan pengungkapan manajemen risiko sebesar 47,84%. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ulfa (2018) pada tahun 2015-2016 dimana dalam penelitiannya menunjukkan tingkat pengungkapan manajemen risiko yang cukup rendah yaitu berada pada angka 28,15%.

Berdasarkan Tabel 1.1 bisa disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih rendah yaitu masih di bawah angka 50%. Rendahnya pengungkapan tersebut tidak lain karena pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan non keuangan khususnya perusahaan manufaktur masih bersifat sukarela, sehingga luas pengungkapan manajemen risiko tidak merata. Berbeda dengan perusahaan keuangan yang memiliki aturan yang lebih ketat. Sehingga dalam penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.

Fenomena tentang tingkat pengungkapan manajemen risiko di atas dapat dijelaskan melalui 2 teori yaitu teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Hubungan antara agen dan *principal* sangat memungkinkan akan terjadi konflik keagenan. Permasalahan ini ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen (manajemen) dengan *principal* (pemilik) atau yang disebut dengan asimetri informasi (Agus, 2019). Konflik asimetri informasi dapat diminimalisir dengan cara melakukan pelaporan dan pengungkapan perusahaan kepada pemilik dan pemegang saham sebagai wujud transparansi dari aktivitas manajemen kepada pemilik dan pemegang saham. Salah satu pengungkapan yang dapat dilakukan manajer adalah pengungkapan manajemen risiko. Sejak terjadinya kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan, pengungkapan manajemen risiko dianggap sebagai salah satu cara penting untuk memperkuat struktur *corporate governance* (Desender, 2010).

Teori sinyal menurut Spence 1973 menjelaskan bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki masalah asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal (Agus, 2019). Salah satu cara memberikan sinyal kepada pihak eksternal yaitu dengan memberikan informasi melalui pengungkapan manajemen risiko. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi adanya

asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dengan pihak eksternal. Pengungkapan manajemen risiko sebagai pemberi sinyal kepada pihak eksternal memberikan kemudahan dalam menganalisis risiko-risiko yang terjadi yang nantinya bisa untuk pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.

Fenomena di atas, disamping dapat dijelaskan secara teoritis namun juga dapat dijelaskan secara empiris dilihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang pengungkapan manajemen risiko. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pengungkapan manajemen risiko telah dilakukan namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Amran et.al. (2009) yang meneliti tentang pengungkapan manajemen risiko dalam *annual report* perusahaan yang ada di Malaysia, dalam penelitian tersebut hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jannah (2016) tentang pengaruh tingkat *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *risk management disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan Syaifurakhman dan Laksito (2016) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Zakiyah (2017) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap pengungkapan manajemen risiko menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) tentang pengaruh *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Dessender (2010) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Widyawati dan Halmawati (2018) tentang pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *enterprise risk management disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *enterprise risk management disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani (2018) tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris,

latar belakang pendidikan komite audit, komite manajemen risiko, kepemilikan institusional dan reputasi auditor, menemukan bahwa adanya pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) tentang pengaruh *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan risiko, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *risk management disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 menemukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko dengan menguji variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan reputasi auditor. Hal ini dikarenakan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil (Widyawati dan Halmawati, 2018). Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki aktivitas yang lebih kompleks dimana hal tersebut mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap *stakeholder* dan lingkungan di sekitar perusahaan, sehingga

perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin meningkat pula jumlah *stakeholder* yang terlibat di dalamnya (Amran et al., 2010). Menurut Syifa (2013) mengemukakan bahwa teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini, semakin besar ukuran perusahaan atau industri maka semakin luas pula pengungkapan manajemen risikonya, sehingga asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* semakin berkurang yang akan berdampak pada semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan.

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola dan juga mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara *sustainable* atau berkesinambungan guna menaikkan nilai saham yang akan berdampak pada nilai perusahaan yang mengalami kenaikan sekaligus merupakan bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditor dan juga masyarakat sekitar (Ismail, 2020). Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Rachman (2012) mekanisme *corporate governance* dibedakan menjadi mekanisme eksternal dan mekanisme internal.

Mekanisme eksternal bisa berasal dari pasar modal, pasar kontrol perusahaan, pasar tenaga kerja, status negara, keputusan pengadilan, pemegang saham dan praktik dari aktifitas investor (Dharmastuti, 2013). Sedangkan

mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director* (*Organization Economic Co-operation Development*, 2007).

Dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perseroan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan, selain itu dewan komisaris dapat mendiskusikannya bersama komite manajemen risiko ataupun komite audit untuk mencari solusi dalam memitigasi risiko tersebut (Cecasmis & Samin, 2016). Teori agensi dapat menjelaskan hubungan antara aktivitas dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini jumlah rapat dewan komisaris mempunyai manfaat kapasitas *monitoring*, pemberian informasi yang efektif serta mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan perwakilan independen dari kepentingan para *stakeholder* sehingga dewan komisaris independen dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih

luas termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan (Widyawati dan Halmawati, 2018). Teori agensi dapat menjelaskan hubungan antara ukuran dewan komisaris independen dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini proporsi jumlah dewan komisaris independen mempunyai manfaat kapasitas *monitoring* dan pemberian informasi yang meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko. Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin luas pengungkapan informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko (Widyawati dan Halmawati, 2018).

Reputasi auditor sangat berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan. Reputasi auditor merupakan suatu basis kepercayaan publik terhadap seorang auditor dalam menentukan kredibilitas suatu laporan keuangan. Reputasi yang dibangun auditor menentukan tingkat kepercayaan para *stakeholder* dalam mempercayai informasi pada sebuah laporan. Maka dari itu, biasanya perusahaan besar akan memilih auditor dari KAP yang sudah dapat dipercaya kredibilitasnya dimata publik. KAP *Big four* digunakan sebagai proksi pengukuran reputasi auditor, dikarenakan telah memiliki kredibilitas tinggi dimata perusahaan maupun *stakeholder*. Teori agensi menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh perusahaan audit berkualitas tinggi seperti auditor *Big four* akan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait manajemen risiko (Nurchayani, 2016). Karena KAP yang berstatus *Big four* akan mengarahkan dan membantu

internal auditor perusahaan dalam mengevaluasi bagaimana praktik penerapan *corporate governance*. Pengungkapan manajemen risiko akan memberikan pemahaman kepada *principal* tentang risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini dapat membantu *stakeholder* dalam memprediksi lebih tepat tentang kondisi perusahaan dimasa yang akan datang. Ketika kualitas penilaian dan pengawasan terhadap risiko meningkat, maka pengungkapan manajemen risiko perusahaan akan lebih efektif sehingga perusahaan akan mengungkapkan risiko yang lebih banyak untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul antara agen dengan *principal*.

Mengingat pentingnya manajemen risiko dan adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu serta kurangnya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti akan meneliti kembali dengan menambahkan variabel moderating dengan tujuan untuk memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderating yang dimaksud adalah komite manajemen risiko. Variabel moderating dipilih karena komite manajemen risiko merupakan unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko. Komite manajemen risiko mempunyai tugas dan wewenang dalam mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku (Nurchayani, 2018). Sehingga, perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit dapat mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Komite manajemen risiko yang berdiri sendiri mempunyai banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi

perusahaan serta dapat mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Nurchayani, 2018).

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Perusahaan ini dipilih karena merupakan perusahaan yang mempunyai risiko yang relatif lebih tinggi dan kompleks dibanding dengan perusahaan yang lainnya. Selain itu juga pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan non keuangan khususnya perusahaan manufaktur sifatnya masih sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Komite Manajemen Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018).

1.2 Identifikasi Masalah

Pengungkapan manajemen risiko adalah suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan (perusahaan dan *stakeholder*) tentang apa yang mengancam perusahaan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks pula kegiatan ataupun proses bisnis dalam perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih banyak dalam mengungkapkan risiko.

2. Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akan semakin efektif pula dewan dalam mengawasi manajemen agar tidak ada informasi yang disembunyikan dalam pengungkapan manajemen risiko.
3. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis serta hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin luas informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko.
4. Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor. Auditor *Big four* dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan

1.3 Cakupan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan memiliki ruang lingkup yang jelas, maka batasan masalah dalam penelitian ini akan menguji variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor dengan komite manajemen risiko sebagai variabel moderating dengan objek penelitian pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018 yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara parsial bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Secara parsial bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Secara parsial bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Secara parsial bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Secara parsial bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Secara parsial bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap luas pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

7. Secara parsial bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
8. Secara parsial bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap luas pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Secara simultan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
7. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
8. Menguji dan menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan literatur mengenai ilmu keuangan serta dapat memberikan bukti empiris khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan di moderasi oleh komite manajemen risiko. Dalam penelitian ini peneliti menghadirkan variabel moderating yaitu komite manajemen risiko, apabila variabel moderating terbukti secara nyata bisa memoderasi pengungkapan

manajemen risiko, maka hasil penelitian ini bisa menjadi hal yang baru dalam mengembangkan penelitian.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan literatur tentang pentingnya *coorporate governance* terhadap pengungkapan risiko sehingga bisa memberikan informasi yang jelas mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Selain itu juga bisa memperbaiki praktik pengungkapan manajemen risiko bagi suatu perusahaan.

b. Bagi Pengguna Informasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna informasi seperti investor, *stakeholder* dan masyarakat mengenai pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor dalam memengaruhi pengungkapan manajemen risiko yang dimoderasi oleh komite manajemen risiko pada perusahaan sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan investasi.

1.7 Orisinilitas Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya melakukan pengujian secara parsial terhadap pengaruh manajemen risiko dari masing-masing variabel. Sementara dalam penelitian ini, peneliti memunculkan variabel moderating yaitu komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko sebagai variabel moderating dapat memperlemah maupun memperkuat variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Teori Utama

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Mackling (1976) menyatakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain atau agen (manajer) untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang aktivitasnya melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan dari *principal* ke agen. Agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan sedangkan *principal* merupakan pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Hubungan antara agen dan *principal* sangat memungkinkan akan terjadi konflik keagenan. Menurut Agus (2019) permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen (manajemen) dengan *principal* (pemilik) atau yang disebut dengan asimetri informasi.

Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara manajemen dengan pemilik maupun pemegang saham. Akibat dari asimetri informasi yang tidak seimbang, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena *principle* kesulitan dalam memantau dan melakukan kontrol terhadap tindakan manajemen. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral Hazard* yaitu permasalahan yang muncul jika manajemen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Konflik asimetri informasi dapat diminimalisir dengan cara perusahaan melakukan pelaporan dan pengungkapan kepada pemilik atau pemegang saham sebagai wujud transparansi dari aktivitas manajemen kepada *principle*. Salah satu pengungkapan yang dapat dilakukan manajer adalah dengan pengungkapan manajemen risiko. Sejak terjadinya kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan, pengungkapan manajemen risiko dianggap sebagai salah satu cara penting untuk memperkuat struktur *corporate governance* (Desender, 2010).

Corporate governance dapat menjadi penghubung antara manajemen dan pemegang saham dengan menggunakan beberapa fungsinya. Salah satunya dengan fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris yang dibantu oleh komite audit. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja manajemen terhadap pemegang saham dalam melaksanakan tugasnya menjalankan sistem operasional perusahaan yang akan berdampak pada nilai perusahaan. *Corporate governance* mempunyai beberapa prinsip, salah satunya adalah tranparansi dalam mengungkapkan suatu informasi. Dengan adanya *corporate governance* yang efektif, diharapkan semakin mewujudkan transparansi informasi yang diterima pemegang saham, salah satunya melalui pengungkapan manajemen risiko.

Manajemen sebagai agen memiliki dan menguasai informasi-informasi spesifik perusahaan yang diperlukan oleh *principal* atau dalam hal ini para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan manajemen dalam pengungkapan manajemen risiko akan digunakan oleh *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu apabila terjadi asimetri informasi di antara pihak agen dan *principal* maka akan menimbulkan dampak yang buruk dalam pengambilan keputusan dan akan merugikan kedua belah pihak (Ulfa, 2018). Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dan mengetahui informasi lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal.

Syifa (2013) mengemukakan bahwa teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini, semakin besar ukuran perusahaan atau industri maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Hal ini yang menyebabkan pengungkapan manajemen risiko yang semakin luas dan informasi yang diberikan juga akan semakin akurat dan lengkap.

Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) menjelaskan bahwa teori agensi juga bisa menjelaskan hubungan antara dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini intensitas rapat dewan komisaris mempunyai manfaat kapasitas *monitoring* dan pemberian informasi yang meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko. Keberadaan dewan komisaris independen juga dapat

mempengaruhi tingkat pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini proporsi jumlah dewan komisaris independen mempunyai manfaat kapasitas *monitoring* dan pemberian informasi yang meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko. Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin luas pengungkapan informasi mengenai manajemen risiko (Widyawati dan Halmawati, 2018).

Teori agensi menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh perusahaan auditor berkualitas tinggi seperti auditor *Big four* akan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait manajemen risiko (Nurcahyani, 2016). Karena KAP yang berstatus *Big four* akan mengarahkan dan membantu internal auditor perusahaan dalam mengevaluasi bagaimana praktik penerapan *corporate governance*. Pengungkapan manajemen risiko akan memberikan pemahaman kepada *principal* tentang risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini dapat membantu *stakeholder* dalam memprediksi lebih tepat tentang kondisi perusahaan dimasa yang akan datang. Ketika kualitas penilaian dan pengawasan terhadap risiko meningkat, maka pengungkapan manajemen risiko perusahaan akan lebih efektif sehingga perusahaan akan mengungkapkan risiko yang lebih banyak untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul antara agen dengan *principal*.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Spence (1973). Teori ini dilandasi atas adanya masalah asimetri informasi yang terjadi antar pihak

manajemen sebagai pihak yang memiliki banyak informasi mengenai kondisi perusahaan dan pemilik perusahaan sebagai pihak yang memiliki keterbatasan informasi tentang kondisi perusahaan. Menurut Widowati dkk (2016) asimetri informasi dapat dikurangi dengan cara pemberian sinyal oleh pihak yang memiliki banyak informasi kepada pihak lain.

Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal (Agus, 2019).

Suatu pengungkapan dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau *abnormal return*. Apabila pengungkapan tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika pengungkapan tersebut memberikan dampak negatif, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal negatif (Agus, 2019). Salah satu cara memberikan sinyal kepada pihak eksternal yaitu dengan memberikan informasi melalui pengungkapan manajemen risiko. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dengan pihak eksternal. Pengungkapan manajemen risiko sebagai pemberi sinyal kepada pihak eskternal memberikan kemudahan dalam menganalisis risiko-risiko

yang terjadi yang nantinya bisa untuk pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.

Nurchayani (2018) menjelaskan teori sinyal dapat menjelaskan pengaruh hubungan antara komite manajemen risiko dengan pengungkapan manajemen risiko. Perusahaan yang memiliki atau membentuk komite manajemen risiko secara terpisah dari komite audit akan memberikan sinyal yang positif kepada para investor karena dalam hal ini pengungkapan manajemen risiko akan lebih luas dan akurat.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pengungkapan Manajemen Risiko

2.2.1.1 Manajemen Risiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 menyebutkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko perusahaan pada setiap kegiatan, mengukur dan mengatasinya pada level toleransi tertentu. Menurut Syifa (2013) manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 kategori utama yaitu:

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung

4. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu.
5. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, karena kreditur, pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko perusahaan serta mengukur dan mengatasinya pada level toleransi tertentu. Dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan strategi yang dapat digunakan untuk tetap bertahan dalam lingkungan usaha yang kompetitif (Syifa, 2013). Menurut KNKG (2011) penerapan manajemen risiko yang baik dapat:

Pertama, mengurangi kejutan-kejutan yang kurang menyenangkan. Ini dapat diperoleh karena melalui penerapan manajemen risiko yang baik di semua hal yang berakibat pada pencapaian sasaran perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya serta mengambil antisipasi.

Kedua, meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin baik. Hal ini dapat diperoleh karena dalam menerapkan manajemen risiko wajib untuk menemukan kembali para pemangku kepentingan dan harapannya melalui komunikasi timbal balik yang cukup giat maka dapat diperoleh persepsi dan kesamaan kepentingan bersama. Dengan demikian dapat diperoleh hubungan yang lebih baik.

Ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan, komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan sehingga mereka mengetahui bahwa perusahaan

mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Akibatnya kepercayaan pelanggan, pemasok, kreditor, komunitas bisnis serta masyarakat juga meningkat.

Keempat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen. Semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diidentifikasi dengan baik, maka cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses organisasi telah diantisipasi sebelumnya. Dengan demikian, bila gangguan tersebut memang terjadi maka organisasi telah siap untuk menanganinya dengan baik.

Kelima, terdapat pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat termasuk risiko kepatuhan dan hukum.

Asmoro dkk (2016) mendefinisikan ERM merupakan suatu strategi yang digunakan untuk tetap bertahan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi menjadikan pengungkapan manajemen risiko sebagai bagian penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan nilai perusahaan.

2.2.1.2 Definisi dan Konsep Pengungkapan Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management (ERM) Committee of Sponsoring Organizations of the Traedway Commission (COSO, 2004) menjelaskan bahwa manajemen risiko perusahaan memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menangani ketidakpastian risiko dan peluang yang meningkatkan kapasitas untuk membangun nilai tambah. Nilai tambah ini akan semakin besar ketika pimpinan

perusahaan menetapkan strategi dan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan usaha dengan risiko yang ada.

Enterprise Risk Management merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengurangi dampak risiko yang berlebihan pada perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan mempertinggi nilai. Oleh karena itu, struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu mengelola risiko bisnis yang lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada *stakeholder* organisasi (Subramaniam et al, 2009).

Dalam penelitian ini pengungkapan manajemen risiko diukur dengan menggunakan metode analisis kandungan (*content analysis*). *Content analysis* adalah metode dengan menggunakan suatu prosedur untuk membuat kesimpulan yang *valid* berdasarkan *text* (Amran et al, 2009). Metode ini dipilih karena peneliti berfokus pada luas atau jumlah pengungkapan manajemen risiko. Selain itu metode ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Abraham dan Cox, 2007; Amran et al., 2009; Abraham dan Shrives, 2014; Syaifurakhman dan Laksito, 2016; Achmad et al., 2017; Ghozali dan Faisal, 2018). Tabel 2.1 menyajikan item-item pengungkapan yang digunakan untuk mengukur pengungkapan manajemen risiko berdasarkan penelitian Linsey dan Shrives (2006), kemudian dikembangkan dan digunakan oleh Amran et al. (2009), Achmad et al. (2017) serta Ghozali dan Faisal (2018).

Tabel 2.1 Item Pengungkapan Manajemen Risiko

No	Kategori Risiko	Komponen
1	Risiko Keuangan	(1) Tingkat suku bunga (2) Tingkat kurs (3) Komoditas (4) Likuiditas (5) Kredit
2	Risiko Operasional	(6) Kepuasan pelanggan (7) Pengembangan produk (8) Kinerja dan efisiensi (9) Sumber (10) Tingkat keusangan persediaan (11) Kegagalan produk/jasa (12) Lingkungan (13) Keselamatan kerja (14) Penurunan merk produk
3	Risiko Pemberdayaan	(15) Kepemimpinan dan manajemen (16) <i>Outsourcing</i> (17) Insentif kinerja (18) Perubahan ketersediaan (19) Komunikasi
4	Risiko Pemrosesan Teknologi dan Informasi	(20) Integritas (21) Akses (22) Ketersediaan Insfrastuktur
5	Risiko Integritas	(23) Kebijakan manajemen risiko (24) Kecurangan manajemen dan karyawan (25) Tindakan ilegal (26) Reputasi
6	Risiko Strategik	(27) Pemindaian lingkungan (28) Industri (29) Portofolio bisnis (30) Pesaing (31) Penentuan harga (32) Valuasi (33) Perencanaan (34) Siklus hidup (35) Pengukuran kinerja (36) Pengaturan (37) Kedaulatan dan politik

Sumber: Linsley dan Shrives, 2006 pada lampiran halaman 137

$\text{Indeks Pengukuran Risiko} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{total item pengungkapan (37)}}$
--

2.2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko

Penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko sudah banyak dilakukan dengan menguji berbagai macam variabel. Penulis merangkumnya sebagai berikut: Jannah (2016) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tingkat *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *risk management disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko yang berarti apabila kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris semakin tinggi maka tingkat pengungkapan manajemen risiko semakin tinggi.

Widiawati dan Halmawati (2018) menguji proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Dari pengujian tersebut didapatkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Wicaksono dan Adiwibowo (2017) menguji faktor yang mempengaruhi praktik pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang

terdaftar di BEI pada tahun 2013. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite manajemen risiko dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko, artinya apabila komite manajemen risiko dan ukuran dewan komisaris semakin tinggi maka tingkat pengungkapan manajemen risiko akan semakin luas.

Setiawan (2016) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dewan komisaris, rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan *consumer goods* di BEI periode 2010-2015. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa *leverage* dan komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Kencana dan Lastanti (2018) menguji *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, KAP *Big Four* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko, artinya jika dewan komisaris independen, KAP *Big Four* dan ukuran perusahaan tinggi maka tingkat pengungkapan manajemen risiko akan semakin meningkat.

Asmoro, dkk (2016) menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Nurcahyani (2018) kembali menguji hubungan proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, latar belakang pendidikan komite audit, komite manajemen risiko, kepemilikan institusi, dan reputasi auditor di *Jakarta Islamic Index (JII)* periode tahun 2014-2016 terhadap pengungkapan

manajemen risiko. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa komite manajemen risiko dan reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko di atas, penelitian ini memfokuskan pada faktor ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor sebagai variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

2.2.2 Ukuran Perusahaan

Menurut Beasley et al. (2005) ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar, karena lebih sulit untuk dilakukan tindakan monitoring.

Besar ukuran yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Perusahaan besar memiliki banyak pemegang kepentingan, oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan (Amran et al., 2009). Menurut Ulfa (2018) Semakin besar perusahaan akan semakin kompleks pula kegiatan atau proses bisnis dalam perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih banyak mengungkapkan risiko, terlebih lagi perusahaan dengan ukuran besar juga memiliki kegiatan usaha yang lebih lengkap yang mungkin akan berakibat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Sehingga dilakukan pengungkapan informasi yang lebih baik untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik (Setiawan, 2016).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar akan memiliki banyak pemegang kepentingan sehingga akan mengungkapkan banyak informasi atau risiko-risiko yang dihadapi yang berguna untuk kepentingan para pemegang saham. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya juga cenderung untuk mengadopsi praktik *corporate governance* yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan risiko informasi (KPMG, 2001).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Zakiyah (2017) serta Kencana dan Lastanti (2018) dimana ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran aset tersebut diukur sebagai logaritma dari total aset. Logaritma digunakan untuk memperhalus nilai dari total aset karena nilai dari total aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

2.2.3 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

nasihat kepada direksi. Menurut Ismail (2020) dewan komisaris merupakan bagian organ dari perseoran atau perusahaan yang terdiri dari seluruh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan atau kontrol dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*, karena dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* itu sendiri. Sedangkan menurut Sulistyarningsih dan Gunawan (2016) dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang melakukan tugas pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perseroan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris merupakan bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengontrol serta memastikan perusahaan melakukan *good corporate governance*.

Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Menurut pasal 114 ayat (3) UU PT dewan komisaris harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian.
- 3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat serta dapat bertindak independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai kepada pemberhentian sementara.

Salah satu fungsi dewan komisaris adalah untuk mewakili kepentingan para pemegang saham dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan direksi (KNKG, 2006). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bisa dilaksanakan apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Rapat dewan komisaris dipimpin oleh komisaris utama dimana semua keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Menurut Ismail (2020) frekuensi jumlah pertemuan yang dilakukan baik di internal dewan komisaris maupun rapat gabungan antara direksi dan dewan komisaris membawa implikasi penting. Berdasarkan teori agensi, keefektifan mekanisme

corporate governance salah satunya ditentukan oleh jumlah rapat dewan komisaris. Hal ini disebabkan karena jumlah rapat dewan komisaris mempunyai manfaat kapasitas *monitoring*, pemberian informasi yang efektif serta mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko (Cecasmis & Samin, 2016). Oleh karena itu semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akan semakin efektif pula dewan dalam mengawasi manajemen agar tidak ada informasi yang disembunyikan dalam pengungkapan manajemen risiko.

Dalam penelitian ini pengukuran atas variabel dewan komisaris dilakukan berdasarkan jumlah rapat dewan komisaris. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Yogi dan Chairiri (2014) dimana dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris pada laporan tahunan perusahaan (*annual report*).

2.2.4 Dewan Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis serta hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

UU Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan jika komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang ada dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik. Keberadaan komisaris independen dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000). Presentase ini dianggap dapat mewakili *stakeholder* yang dianggap minoritas, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan antara *stakeholder* mayoritas dan minoritas (Nugraha dan Meiranto, 2015 dalam Agus, 2019).

Komisaris independen dianggap mampu memberikan pengawasan yang lebih baik dengan pengecekan secara independen terhadap pimpinan (Nurchayani, 2018). Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena komisaris independen tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri (Nurchayani 2018). Selain itu keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*.

Dalam Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia menurut *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governace* (2006), dalam upaya

untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara produktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi yang terkait dengan perusahaan namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Menurut Keputusan Direksi BEJ No.315/BEJ/06-2000 kriteria menjadi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) perusahaan tercatat yang bersangkutan dan juga bukan sebagai pemegang saham mayoritas.

2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholder*) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
6. Komisaris independen dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitas sebagai eksekutif oleh perusahaan dalam satu kelompok usaha dan dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi tersebut.
7. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
8. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan dalam satu kelompok atau dengan cara berhubungan secara langsung atau tidak secara langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
9. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan dalam satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
10. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan atau urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan

kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

11. Komisaris independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada dewan komisaris tercatat.

Dalam penelitian ini proporsi dewan komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris dikali dengan 100%. Dalam hal ini informasi mengenai dewan komisaris independen dapat dilihat dalam *annual report* perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Agus, 2019). Rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}} \times 100\%$$

2.2.5 Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self-interested*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dan agen sangat diperlukan. Dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang berprestasi (Syifa, 2013).

Saat ini auditor menjadi faktor utama pengawasan organisasi dan berperan penting bagi manajemen risiko. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan dari

Auditor *Big four* tentang kualitas monitoring internal yang terdapat pada klien Auditor *Big four* dibandingkan dengan kualitas monitoring dari non Auditor *Big four*. Auditor *Big four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Auditor *Big four* dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen et al., 2009).

Menurut Ulfa (2018) KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan Auditor *Big four* yaitu:

1. KAP Pricewaterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan, PT Prima Wahana Caraka, PT Pricewaterhouse Coopers Indonesia Penasehat dan PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia.
2. KAP KPMG (Klynveld Peack Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, KPMG Advisory Indonesia dan KPMG Siddharta Advisory.
3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny, Deloitte Tax Solution (DTS), PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI), dan PT Delloite Consulting.

Dalam penelitian ini reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, angka 1 akan diberikan kepada perusahaan yang menggunakan KAP *Big four* dan angka 0 akan diberikan kepada perusahaan yang menggunakan non KAP *Big four*. Penelitian yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) menemukan adanya pengaruh yang positif antara KAP *Big four* terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.

2.2.6 Komite Manajemen Risiko

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan bahwa komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 pasal 17 ayat 2 wewenang dan tanggung jawan komite manajemen risiko adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama paling sedikit mencakup:

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Komite manajemen risiko (*Risk Management Committe*) merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris

serta membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Setiawan 2016). Pembentukan komite risiko ini memiliki tujuan untuk membantu dewan direksi dalam mengelola risiko, menetapkan kebijakan risiko yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. Komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit akan mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Subramaniam, et al., 2009). Selain itu, komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit juga lebih memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009).

Pada penelitian ini komite manajemen risiko diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko yang berdiri sendiri dan terpisah dari komite audit akan diberi nilai 1 kemudian nilai 0 apabila perusahaan tidak memiliki komite manajemen risiko. Pengukuran menggunakan variabel *dummy* dikarenakan pada perusahaan manufaktur pembentukan komite manajemen risiko sifatnya masih sukarela. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ghozali dan Faisal (2018) dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa komite manajemen risiko mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016) menguji pengaruh tingkat *leverage*,

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko. Dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014, pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan sampel 333 perusahaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.

Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh sebanyak 34 sampel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, reputasi auditor, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.

Kencana dan Lastanti (2018) melakukan penelitian kembali tentang pengaruh *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, ukuran komite audit, *leverage* dan tingkat sensitivitas lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan dewan komisaris, KAP *Big four* dan

ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.

Syaifurakhman dan Laksito (2016) menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014. Sampel dalam penelitian adalah 99 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap praktik pengungkapan manajemen risiko dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap praktik pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan likuiditas dan *degree of operation leverage* menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Nurchayani (2018) menganalisis fakto-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko pada *Jakarta Islamic Index (JII)* periode tahun 2014-2016. Penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 17 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris, latar belakang pendidikan komite audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan latar belakang pendidikan komisaris, komite manajemen risiko dan reputasi auditor mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Gunawan dan Zakiyah (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015 terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Pemilihan sampel

menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh data sebanyak 472 perusahaan. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan reputasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Adam et al (2015) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, profitabilitas, likuiditas, tipe auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen dan tipe auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan *leverage*, profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Dessender (2010) menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen dan pemisahan CEO terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan pemisahan CEO dan ketua memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Khumairoh dan Agustina (2017) menguji faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko dengan dewan komisaris sebagai variabel moderating pada perusahaan non keuangan tahun 2013-2015. pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan Al-maghzom et.,ral (2016) yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, *non-executive director*, komite audit independen, ukuran komite audit, rapat komite audit, jenis kelamin, *tenure*/masa jabatan, dan pendidikan terhadap pengaruh pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan di arab sudi yang listing di *saudi exchange stock market* dari tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian menunjukkan hasil kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan, komisaris independen berpengaruh positif signifikan, *non-executive director* berpengaruh negatif tidak signifikan, komite audit independen berpengaruh negatif tidak signifikan, ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan, rapat komite audit dan jenis kelamin berpengaruh positif signifikan, *tenure*/masa jabatan dan pendidikan dan jenis industri berpengaruh negatif tidak signifikan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad et al (2017) yang melakukan penelitian tentang pengaruh komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dari penelitian tersebut komite audit, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Komisaris independen, kepemilikan publik dan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan

manajemen risiko. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan.

Dari uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, penulis meringkasnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel dan Objek Penelitian	Hasil
Jannah (2016)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen : Tingkat <i>leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran perusahaan	Manufaktur di BEI	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.
Sulistyaningsih dan Gunawan (2016)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen : Kepemilikan manajerial, Kepemilikan publik, Ukuran Dewan komisaris, Reputasi auditor, <i>Leverage</i> , dan Ukuran perusahaan	Manufaktur di BEI	Kepemilikan manajerial, reputasi auditor, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko
Kencana dan Lastanti (2018)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen : Struktur kepemilikan yang	Manufaktur di BEI	Struktur kepemilikan, ukuran komite audit, <i>leverage</i> dan tingkat sensitivitas lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan Dewan komisaris Independen, KAP

	terkonsentrasi, Dewan komisaris independen, Ukuran komite audit, KAP <i>Big Four</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan tingkat sensitivitas lingkungan		<i>Big four</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.
Syaifurakhman dan Laksito (2016)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen: Komite audit, Dewan komisaris, Keberadaan wanita dalam komite audit dan <i>Degree Operation Leverage</i>	Manufaktur di BEI	Ukuran komite audit berpengaruh terhadap praktik pengungkapan manajemen risiko dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap praktik pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan likuiditas dan <i>degree of operation leverage</i> menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Nurchayani (2018)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen: Proporsi dewan komisaris independen, Latar belakang pendidikan dewan komisaris, Latar belakang pendidikan komite audit, Komite manajemen risiko, Kepemilikan	Jakarta Islamic Index (JII)	Proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan komite audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan latar belakang pendidikan komisaris, komite manajemen risiko dan reputasi auditor mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

	institusi, dan Reputasi auditor		
Gunawan dan Zakiyah (2017)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen : Kepemilikan institusional, Ukuran dewan komisaris, Reputasi auditor, Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> .	Perusahaan Non Keuangan di BEI	Kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan reputasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.
Adam et al (2015)	Dependen: Pengungkapan Manajemen Risiko Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Likuiditas, Tipe Auditor	Perusahaan Pebankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013	Ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen dan tipe auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko. <i>Leverage</i> , profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Dessender (2010)	Dependen : Pengungkapan manajemen risiko Independen : Dewan direksi, Komisaris Independen, Pemisahan CEO dan Pemilik perusahaan	Manufaktur	Dewan direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan pemisahan CEO dan Pemilik perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.
Khumairoh dan Agustina (2017)	Dependen : ERM Independen :	Non Keuangan	Kepemilikan manajemen, Kepemilikan publik, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan

	Kepemilikan manajemen, Kepemilikan publik, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Moderting : Dewan Komisaris		<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan Kepemilikan Institusional dan Ukuran perusahaan dengan dimodearsi oleh dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko
Al-Maghzom et al (2016)	Dependen : Pengungkapan Risiko Independen : Kepemilikan manajerial. Kepemilikan Publik, Ukuran dewan komisaris, Komisaris Independen, <i>Non executive director</i> , Komite audit independen, Ukuran komite audit, Rapat komite audit, Jenis kelamin, <i>Tenure</i> /Masa jabatan, Pendidikan, Jenis Industri Kontrol: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas	Perbankan yang listing di <i>Saudi Exchange Stock Market</i> tahun 2009-2013	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan. Kepemilikan Publik berpengaruh positif signifikan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan. Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan. <i>Non-executive director</i> berpengaruh negatif tidak signifikan. Komite audit independen berpengaruh negatif tidak signifikan. Ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan. Rapat komite audit dan Jenis kelamin berpengaruh positif signifikan. <i>Tenure</i> /Masa jabatan dan Pendidikan dan Jenis Industri berpengaruh negatif tidak signifikan Ukuran perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan.
Achmad et al (2017)	Dependen : ERM Independen:	Perusahaan yang	Komite audit, Ukuran perusahaan dan Kinerja keuangan memiliki pengaruh

	Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan	terdaftar di BEI	positif yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko Komisaris Independen, Kepemilikan Publik dan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan
--	--	---------------------	---

Sumber : Jurnal penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang beragam. Menurut Jannah (2016) dan Achmad et al (2017) ukuran perusahaan dianggap berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Khumairoh dan Agustina (2017) berpendapat sebaliknya yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Gunawan dan Zakiyah (2017) menyebutkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syaifurakhman dan Laksito (2016) menemukan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Reputasi auditor menurut Nurcahyani (2018) memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan menurut Kencana dan Lastanti (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko. Dessender (2010) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan menurut

Kencana dan Lastanti (2018) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.4 Kerangka Berfikir

Semakin berkembangnya dunia teknologi dan informasi tidak hanya mendorong berkembangnya dunia bisnis secara global namun juga meningkatkan risiko-risiko bisnis yang lebih dinamis. Oleh karena itu pengungkapan manajemen risiko berperan penting dalam perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko menjadi hal yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para investor dan pemangku kepentingan. Pengungkapan manajemen risiko yang transparan akan membantu para investor dalam membuat keputusan investasi.

Saat ini para *stakeholder* atau investor menginginkan tidak hanya informasi-informasi keuangan dalam *annual report* yang harus disampaikan kepada para pengguna informasi akan tetapi terdapat hal lain yang bisa menambah nilai lebih dari suatu perusahaan yaitu dengan mengungkapkan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko pada penelitian ini didasarkan pada 2 teori yaitu teori agensi dan teori sinyal.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar, karena lebih sulit untuk dilakukan tindakan *monitoring* (Beasley et al.,2005). Semakin besar perusahaan

maka akan semakin kompleks pula kegiatan ataupun proses bisnis dalam perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih banyak mengungkapkan risiko (Ulfa, 2018).

Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini, semakin besar ukuran perusahaan atau industri maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Hal ini yang menyebabkan pengungkapan manajemen risiko yang semakin luas dan informasi yang diberikan juga akan semakin akurat dan lengkap (Syifa, 2013).

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya juga cenderung untuk mengadopsi praktik *corporate governance* yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG, 2001). Pengungkapan informasi yang luas akan mempermudah kreditur untuk memperoleh informasi perusahaan secara detail. Hal ini juga akan membantu para investor dalam membuat keputusan investasi.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menjelaskan antara hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Gunawan dan Zakiyah (2017) serta Kencana dan Lastanti (2018) menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jannah (2016) serta Widhiawati dan

Halmawati (2018) juga menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko

Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6). Dewan komisaris bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan atau kontrol dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* karena dewan komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* itu sendiri (Ismail, 2020).

Berdasarkan teori agensi, keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh jumlah rapat dewan komisaris. Hal ini disebabkan karena jumlah rapat dewan komisaris mempunyai manfaat kapasitas *monitoring*, pemberian informasi yang efektif serta mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko (Cecasmis & Samin, 2016). Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akan semakin efektif pula dewan dalam mengawasi manajemen agar tidak ada informasi yang disembunyikan dalam pengungkapan manajemen risiko.

Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan antara hubungan dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan Sulistyarningsih dan Gunawan (2016), Syaifurakhman dan Laksito (2016) dan Wicaksono dan Adiwibowo (2017) menunjukkan hasil adanya pengaruh positif antara dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko.

Secara parsial dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis serta hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Menurut Nurcahyani (2018) Komisaris independen dianggap mampu memberikan pengawasan yang lebih baik dengan pengecekan secara independen terhadap pimpinan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan, karena komisaris independen tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri (Setiawan, 2016)

Teori agensi menjelaskan keberadaan dewan komisaris independen juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan manajemen risiko. Semakin banyak

jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin luas informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko (Widyawati dan Halmawati, 2018). Selain itu, keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder* (Agus, 2019).

Terdapat beberapa penelitian yang menguji hubungan antara dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018), Beasley et.al (2005) menunjukkan adanya pengaruh positif antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan manajemen risiko.

Secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.4 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self-interested*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang berprestasi (Praptitorini dan Janaurti, 2007 dalam Syifa, 2013).

Auditor *Big four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Auditor *Big four*

dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen et al.,2009).

Teori agensi menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh perusahaan auditor berkualitas tinggi seperti auditor *Big four* akan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait manajemen risiko (Nurchayani, 2016). Karena KAP yang berstatus *Big four* akan mengarahkan dan membantu internal auditor perusahaan dalam mengevaluasi bagaimana praktik penerapan *corporate governance*. Pengungkapan manajemen risiko akan memberikan pemahaman kepada *principal* tentang risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini dapat membantu *stakeholder* dalam memprediksi lebih tepat tentang kondisi perusahaan dimasa yang akan datang.

Terdapat beberapa penelitian yang menguji hubungan antara pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko. Gunawan dan Zakiyah (2017) dan Kencana dan Lastati (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif antara reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurchayani (2018) dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Secara parsial reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar karena lebih sulit untuk dilakukan tindakan *monitoring* (Beasley et al.,2005). Semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks pula kegiatan ataupun proses bisnis dalam perusahaan tersebut oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih banyak mengungkapkan risiko (Ulfa, 2018). Pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko diduga dapat diperkuat oleh komite manajemen risiko.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko merupakan unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko. Komite manajemen risiko mempunyai tugas dan wewenang dalam mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku (Nurcahyani, 2018). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko sendiri yang terpisah dari komite audit dapat mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Komite manajemen risiko yang berdiri sendiri

mempunyai banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Nurchayani, 2018).

Teori agensi diduga dapat memprediksi hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori agensi, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan. Menurut Setiawan (2016) bahwa perusahaan besar menjadi sorotan bagi masyarakat dan pemerintah sehingga penyelenggaraan komite manajemen risiko merupakan hal yang penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Disisi lain, perusahaan besar memiliki aset yang besar pula sehingga perusahaan cenderung menyelenggarakan komite manajemen risiko dengan tujuan untuk melindungi aset tersebut dengan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Secara parsial komite manajemen risiko memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.6 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan atau kontrol dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan

melaksanakan *good corporate governance* karena dewan komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* itu sendiri (Ismail, 2020).

Berdasarkan teori agensi, keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh jumlah rapat dewan komisaris. Hal ini disebabkan karena jumlah rapat dewan komisaris mempunyai manfaat kapasitas *monitoring*, pemberian informasi yang efektif serta mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko (Cecasmı & Samin, 2016).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan bahwa komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko merupakan unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko. Komite manajemen risiko mempunyai tugas dan wewenang dalam mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku (Nurchayani, 2018). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko sendiri yang terpisah dari komite audit akan mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Komite manajemen risiko yang berdiri sendiri mempunyai banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Nurchayani, 2018).

Teori agensi diduga dapat memprediksi hubungan antara dewan komisaris dan pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori agensi, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan. Semakin banyak komite yang terdapat dalam struktur *good corporate governance*, perusahaan akan membutuhkan fungsi pengawasan yang lebih intensif. Dimana akan semakin banyak rapat dewan komisaris yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, termasuk pengawasan terhadap komite manajemen risiko. Sehingga semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan semakin efektif pula dewan komisaris mengawasi kinerja dari komite manajemen risiko.

Dengan adanya pengawasan serta tekanan yang dilakukan oleh dewan komisaris, diharapkan perusahaan memiliki anggota komite manajemen risiko yang lebih kompeten dalam manajemen risiko. Keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit akan memberi kontrol kuat terkait dengan analisis risiko-risiko yang terjadi diperusahaan, dengan begitu perusahaan akan mengungkapkan risiko-risiko yang terjadi secara tepat. Sehingga perusahaan dapat tetap mempertahankan citranya di mata calon investor.

Secara parsial komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.7 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis serta hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Menurut Nurcahyani (2018) Komisaris independen dianggap mampu memberikan pengawasan yang lebih baik dengan pengecekan secara independen terhadap pimpinan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena komisaris independen tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri (Setiwan, 2016 dalam Nurcahyani 2018). Menurut Agus (2019). Selain itu, keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan bahwa komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk

komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko merupakan unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko. Komite manajemen risiko mempunyai tugas dan wewenang dalam mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku (Nurchayani, 2018). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko sendiri yang terpisah dari komite audit dapat mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Komite manajemen risiko yang berdiri sendiri mempunyai banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi pengendalian terkait risiko-risiko secara keseluruhan (Andrarini & Januarti, 2012 dalam Nurchayani, 2018).

Teori agensi diduga dapat memprediksi hubungan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori agensi, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan. Komisaris independen menganggap pembentukan komite manajemen risiko sebagai suatu hal yang penting dan dapat membantu tugas pengawasannya dalam memantau manajemen risiko perusahaan. Besarnya proporsi komisaris independen merupakan sumber daya perusahaan agar bisa meminimalkan biaya agensi yang terjadi dan untuk meminimalkan biaya yang timbul akibat konflik agensi tersebut. Sehingga keberadaan komite manajemen risiko akan memberikan kontrol kuat terkait dengan analisis risiko-risiko yang terjadi di perusahaan, dengan begitu perusahaan akan mengungkapkan risiko-risiko

yang terjadi secara tepat. Sehingga perusahaan dapat tetap mempertahankan citranya di mata calon investor.

Secara parsial komite manajemen risiko memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.8 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self-intereset*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dan agen sangat diperlukan dalam hal ini adalah auditor independen. Investor lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang berprestasi (Praptitorini dan Janaurti, 2007 dalam Syifa, 2013).

Auditor *Big four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Auditor *Big four* dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen et al.,2009). Perusahaan yang diaudit oleh perusahaan auditor berkualitas tinggi seperti auditor *Big four* akan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait manajemen risiko (Nurchayani, 2016). Karena KAP yang berstatus *Big four* akan mengarahkan dan membantu

internal auditor perusahaan dalam mengevaluasi bagaimana praktik penerapan *corporate governance*.

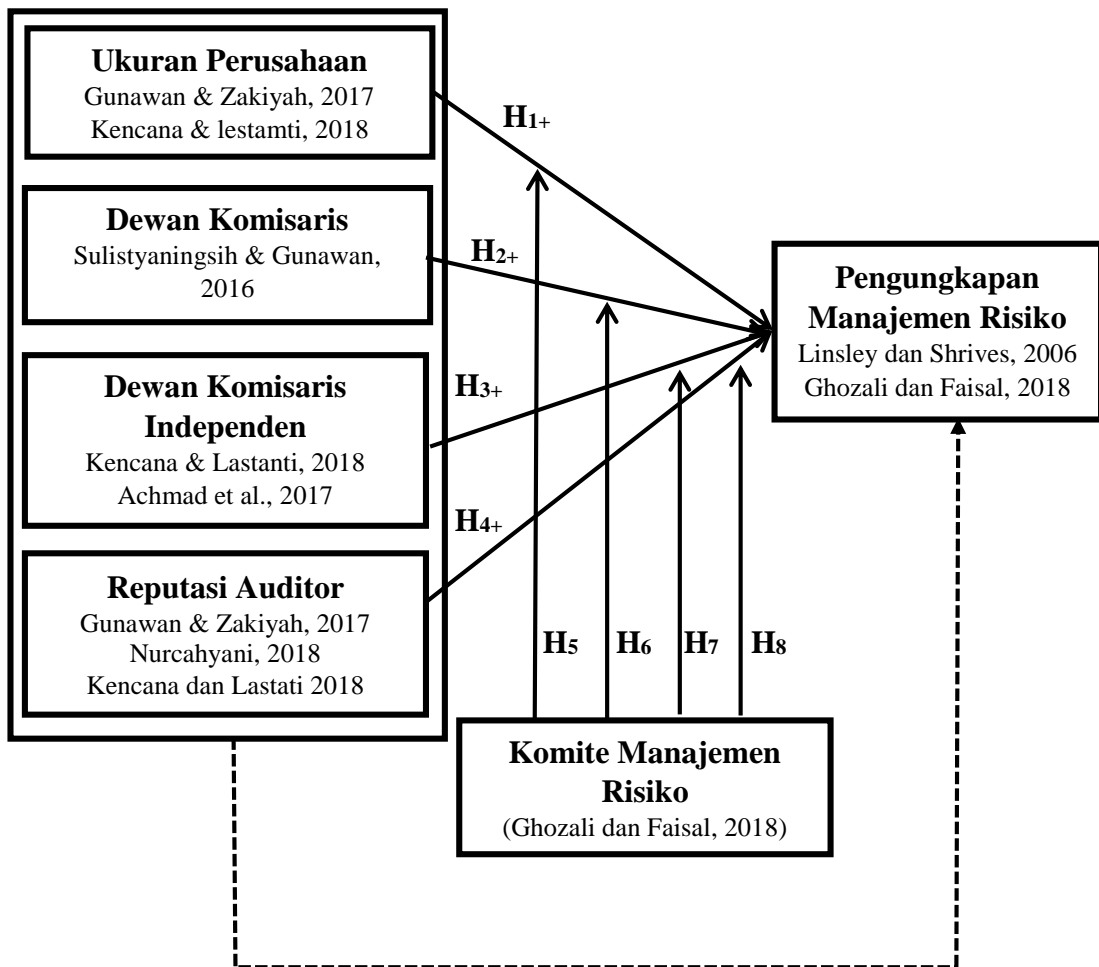
Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan bahwa komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko merupakan unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko. Komite manajemen risiko mempunyai tugas dan wewenang dalam mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku (Nurchayani, 2018). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko sendiri yang terpisah dari komite audit dapat mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Komite manajemen risiko yang berdiri sendiri mempunyai banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Andrarini & Januarti, 2012 dalam Nurchayani, 2018).

Teori agensi diduga dapat memprediksi hubungan antara dewan komisaris dan pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori agensi, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan. Keinginan untuk menjaga kualitas audit dan untuk melindungi

reputasi mereka dari pengguna jasa audit menjadi tuntutan utama auditor yang bergabung dalam auditor *Big four* (Subramaniam, et al., 2009). Auditor eksternal memandang keberadaan komite manajemen risiko akan membantu mereka menjaga reputasi yang dimilikinya karena sistem pengawasan terhadap risiko pada perusahaan akan semakin memperkecil risiko kesalahan audit. Keberadaan komite manajemen risiko akan memberi kontrol kuat terkait dengan analisis risiko-risiko yang terjadi di perusahaan, dengan begitu perusahaan akan mengungkapkan risiko-risiko yang terjadi secara tepat. Sehingga perusahaan bisa tetap mempertahankan citranya di mata calon investor.

Secara parsial komite manajemen risiko memperkuat pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan, maka model penelitian bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko
- H₂: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko
- H₃: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.
- H₄: Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.
- H₅: Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
- H₆: Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko.
- H₇: Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko.
- H₈: Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang menjadi objek dalam penelitian. Sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasi.

Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan (*annual report*) perusahaan sebagai media yang tepat untuk menganalisis pengungkapan manajemen risiko. Laporan tahunan (*annual report*) tidak hanya berisi tentang laporan keuangan saja, namun berisi laporan non keuangan perusahaan yang didalamnya termasuk manajemen risiko perusahaan.

Desain dalam penelitian ini menggunakan studi pengujian hipotesis (*hypothesis study*). Menurut Wahyudin (2015) studi pengujian hipotesis (*hypotesis study*) merupakan studi yang pada umumnya bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan bukti empiris terhadap pola hubungan antara dua variabel atau lebih, baik yang bersifat koresional (*correlation*), kausalitas (*causality*) maupun

yang bersifat komparatif (*comparative*). Penelitian ini menguji hipotesis yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah mempublikasikan laporan tahunan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Teknik *purposive sampling* digunakan bertujuan agar memperoleh sampel yang *representative* dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Berikut ini adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit untuk periode yang berakhir 31 Desember pada tahun 2016-2018.
2. Laporan keuangan tahunan (*annual report*) menggunakan mata uang rupiah (Rp)
3. Melakukan pengungkapan manajemen risiko dan pengungkapan *corporate governance*.
4. Perusahaan memiliki data yang diperlukan secara lengkap selama periode pengamatan dalam laporan *annual report*.

Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan diperoleh sampel akhir sebanyak 189 sampel atau unit analisis dalam waktu 3 tahun pengamatan namun terdapat 27 data *outlier* sehingga diperoleh sebanyak 162 unit analisis. Ringkasan kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel		Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018		162
Dikurangi		
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan/atau laporan keuangan berturut-turut dan lengkap selama tahun pengambilan sampel yaitu 2016 - 2018.	47	
Perusahaan manufaktur yang laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) tidak menggunakan mata uang rupiah (Rp)	29	
Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan pengungkapan manajemen risiko dan pengungkapan <i>corporate governance</i>	18	
Perusahaan yang tidak memiliki data secara lengkap selama periode pengamatan dalam laporan <i>annual report</i> .	5	
Perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai sampel		63
Tahun Observasi	3	
Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2016 - 2018		189
Data <i>outlier</i> yang dieliminasi dari sampel	27	
Jumlah akhir unit analisis penelitian selama tahun 2016 - 2018		162

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2020

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016). Pengungkapan manajemen risiko diukur dengan menggunakan metode analisis kandungan (*content analysis*). *Content analysis* adalah metode dengan menggunakan suatu prosedur untuk membuat kesimpulan yang *valid* berdasarkan *text* (Amran et al, 2009). Metode ini dipilih karena peneliti berfokus pada luas atau jumlah pengungkapan manajemen risiko. Selain itu metode ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Abraham dan Cox, 2007; Amran et al., 2009; Abraham dan Shrives, 2014; Syaifurakhman dan Laksito, 2016; Achmad et al., 2017; Ghozali dan Faisal, 2018).

$$\text{Indeks Pengukuran Risiko} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{total item pengungkapan (37)}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini ada 4, yaitu ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor.

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Pada umumnya perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas daripada perusahaan yang kecil.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Zakiyah (2017) serta Kencana dan Lastanti (2018) dimana ukuran perusahaan

diukur menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran aset tersebut diukur sebagai logaritma dari total aset. *Logaritma natural* digunakan untuk memperhalus nilai dari total aset karena nilai dari total aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6). Dewan komisaris bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan atau kontrol dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* karena dewan komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* itu sendiri (Ismail, 2020).

Dalam penelitian ini pengukuran atas variabel dewan komisaris dilakukan berdasarkan jumlah rapat dewan komisaris. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Yogi dan Chairiri (2014) dimana dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan pada laporan tahunan perusahaan (*annual report*).

3. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis serta hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Dalam penelitian ini proporsi dewan komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris. Dalam hal ini informasi mengenai dewan komisaris independen dapat dilihat dalam *annual report* perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Agus, 2019).

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}} \times 100\%$$

4. Reputasi Auditor

Auditor *Big four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Auditor *Big four* dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen et al., 2009).

Dalam penelitian ini reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, angka 1 akan diberikan kepada perusahaan yang menggunakan KAP *Big four* dan angka 0 akan diberikan kepada perusahaan yang menggunakan non KAP *Big four*. Penelitian yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) menemukan adanya pengaruh yang positif antara KAP *Big four* terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.

3.3.3 Variabel Moderating

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko merupakan sub komite yang memberikan pendidikan manajemen risiko pada tingkat dewan untuk risiko yang tepat dan strategi risiko, perkembangan kepemilikan pengawasan manajemen risiko oleh dewan dan *review* pelaporan risiko perusahaan. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko (Setiawan, 2016). Pengukuran keberadaan komite manajemen risiko menggunakan variabel *dummy* yaitu apabila perusahaan mempunyai komite manajemen risiko yang berdiri sendiri dan terpisah dari komite audit diberi nilai 1 dan sebaliknya diberikan nilai 0 apabila tidak mempunyai komite manajemen risiko.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), *standar deviasi* dan *median* (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif merupakan bentuk penyajian berbagai ukuran angka yang sangat penting bagi sampel penelitian. *Mean* digunakan untuk menghitung rata-rata variabel atau data yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut yang paling banyak diungkapkan. Minimum digunakan untuk mengetahui atribut yang paling sedikit diungkapkan. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mempermudah

dalam memahami pengukuran indikator-indikator dalam setiap variabel dalam penelitian.

3.4.2 Analisis Statistik Inferensial

3.4.2.1 Metode Regresi Variabel Moderating

Dalam penelitian ini menggunakan *Moderated regression analysis* (MRA) dengan uji interaksi. Menurut Ghazali (2018:227) *Moderated regression analysis* (MRA) adalah pendekatan analitis yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Menurut Ghazali (2011:223) Uji MRA dengan uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Tujuan regresi moderasi ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Persamaan *Moderated regression analysis* (MRA) adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_1 * X_5 + \beta_7 X_2 * X_5 + \beta_8 X_3 * X_5 + \beta_9 X_4 * X_5 + e$$

Keterangan:

Y : Pengungkapan Manajemen Risiko

α : Konstanta

β : Regresi

X1 : Ukuran Perusahaan

X2 : Dewan Komisaris

X3 : Dewan Komisaris Independen

X4 : Reputasi Auditor

X5 : Komite Manajemen Risiko

X1*X5 : Interaksi Ukuran Perusahaan dengan Komite Manajemen Risiko

X2*X5 : Interaksi Dewan Komisaris dengan Komite Manajemen Risiko

X3*X5 : Interaksi Dewan Komisaris Independen dengan Komite Manajemen Risiko

X4*X5 : Interaksi Reputasi Auditor dengan Komite Manajemen Risiko

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menjadikan model regresi dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018:30) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov*. Data terdistribusi normal apabila hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2018:107) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen nya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya

korelasi antar variabel independen dalam model regresi, dapat dilihat dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*):

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
- 2) Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.
3. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2018:111).

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin Watson* (D-W). Uji ini dapat diketahui apabila tingkat $\alpha = 5\%$ dan nilai D-W lebih besar dari d_u atau D-W lebih kecil dari $4-d_u$ (Ghozali, 2018:112).

4. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Uji glejser dapat dilakukan dengan meregresi nilai absolut terhadap variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan bahwa penelitian terbebas dari gangguan heteroskedastisitas salah satunya dengan menggunakan koefisien signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5% (0,05). Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedestisitas (Ghozali, 2018:142)

3.4.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen, reputasi auditor dan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko menggunakan:

3.4.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen dengan dimoderasi oleh variabel moderating. Jika nilai Sig. $< \alpha$ (0,05), maka ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179).

3.4.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:179) uji signifikansi parsial (uji t) bertujuan untuk menguji seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara parsial/individual. Penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka hipotesis terdukung yang berarti secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka hipotesis tidak terdukung yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squared*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) bertujuan untuk mengukur sejauh mana model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R-Squared* kecil yang mendekati 0 artinya kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai *Adjusted R-Squared* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.4.4.4 Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur faktor manakah yang paling berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai r^2 yang besar menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen. Tujuan menghitung koefisien determinasi parsial (r^2)

adalah untuk mengetahui variabel independen mana yang paling dominan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2015)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), *standar deviasi* dan *median* (Ghozali, 2018:19). Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini menggambarkan data dari variabel dependen yaitu pengungkapan manajemen risiko, variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor, serta variabel moderating yaitu komite manajemen risiko.

4.1.1.1 Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengungkapan manajemen risiko diukur menggunakan metode *content analysis* dengan menggunakan skor 1 untuk setiap item yang diungkapkan pada *annual report* perusahaan dan skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan yang kemudian dilakukan penjumlahan skor dan dibagi dengan skor total item yaitu 37 item. Penelitian ini bersumber dari Linsey dan Shrives (2006) dan dikembangkan oleh Amran et al. (2009), Achmad et al. (2017) serta Ghozali dan Faisal (2018). Hasil analisis statistik deskriptif pengungkapan manajemen risiko dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ERM
Descriptive Statistic**

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
ERM	162	1.000	0.676	0.831	0.838	0.087
Valid N(Listwise)	162					

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 143

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian sebanyak 162 yang diperoleh dari *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018. Pengungkapan manajemen risiko memiliki rentang nilai dari 0,676 hingga 1.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai terendah (*minimum*) dari pengungkapan manajemen risiko adalah 0,676 yang dimiliki oleh perusahaan Beton Jaya Manunggal Tbk pada tahun 2016 dan 2017, Perusahaan Lionmesh Prima Tbk tahun 2016, 2017 dan 2018, Perusahaan Asiaplast Industries Tbk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 kemudian perusahaan Kedaung Indah Can Tbk tiga tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,000 dimiliki oleh Perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dan perusahaan Chitose International Tbk tahun 2016 dan 2017.

Pengungkapan manajemen risiko memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,831 dan nilai median sebesar 0,838. Kemudian untuk nilai standar deviasinya adalah 0,087, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) maka penyebaran data tersebut berdistribusi secara merata. Selain itu nilai median lebih besar dari nilai *mean*, maka dapat diartikan nilai pengungkapan manajemen risiko

rendah. Berikut ini merupakan Tabel hasil analisis statistik distribusi frekuensi dari pengungkapan manajemen risiko:

Tabel 4.2 Hasil Distribusi Frekuensi Pengungkapan Manajemen Risiko

ERM					
	Interval	Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	0.676-0.716	14	8.6	8.6	Sangat Rendah
	0.717-0.757	36	22.2	22.2	Rendah
	0.758-0.798	14	8.6	8.6	Cukup
	0.799-0.839	28	17.3	17.3	Tinggi
	0.840-1.000	70	43.2	43.2	Sangat Tinggi
	Total	162	100.0	100.0	

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 143

Hasil statistik pada Tabel 4.2 distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) variabel pengungkapan manajemen risiko sebesar 0.831 berada pada interval 0,799 sampai dengan 0,839 dimiliki oleh beberapa perusahaan diantaranya Semen Indonesia (Persero) Tbk (2017 & 2018), Waskita Beton Precast Tbk (2016 & 2018), Arwana Citra Mulia Tbk (2016 & 2017), Saranacentral Bajatama Tbk (2016), Indo Acitama Tbk (2016), Champion Pratama Industri Tbk (2016 & 2017), Impack Pratama Industri Tbk (2016, 2017 & 2018), Trias Sentosa Tbk (2016, 2017 & 2018), Yanaprima Hastapersada Tbk (2018), Malindo Feedmill Tbk (2018), Sierad Produce Tbk (2018), Indomobil Sukses Internasional Tbk (2016 & 2017), Sunson Textile Manufacture Tbk (2018) dan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (2016, 2017 & 2018). Artinya rata-rata luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia tinggi.

Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kriteria sangat tinggi sebesar 43,2% dengan frekuensi 70. Kemudian untuk kriteria sangat rendah

yaitu sebesar 8,6% dimiliki oleh perusahaan Beton Jaya Manunggal Tbk (2017 & 2018), Lionmesh Prima Tbk (2016, 2017 & 2018), Asiaplast Industries Tbk (2016, 2017 & 2018), Yanaprima Hastapersada Tbk (2016), Delta Djakarta Tbk (2016 & 2017) dan Kedaung Indah Can Tbk (2016, 2017 & 2018).

Tingginya pengungkapan manajemen risiko yang ditandai dengan rata-rata (*mean*) 0, 831 menandakan bahwa pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2018 tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan mulai menyadari pentingnya pengungkapan informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko.

4.1.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dimana dibagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *log normal* total aset. Hasil analisis statistik dapat dilihat dalam Tabel 4.3:

**Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Firm Size
Descriptive Statistic**

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
Firm Size	162	31.867	25.216	28.342	28.142	1.540
Valid N (Listwise)	162					

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 143

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian sebanyak 162 yang diperoleh dari *annual report* perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Ukuran perusahaan memiliki nilai maksimum sebesar 34,504 dan nilai minimum sebesar 25,216. Nilai maksimum *Ln* total aset 31,867 dimiliki oleh perusahaan Gudang Garam Tbk sedangkan nilai minimum 25,216 dimiliki oleh perusahaan Primarindo Asia Infrastructure Tbk.

Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) *Ln* total aset sebesar 28.342 sedangkan nilai median *Ln* total aset sebesar 28.142. Kemudian untuk nilai standar deviasi *Ln* total aset adalah 1.540. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) maka penyebaran data tersebut berdistribusi secara merata. Selain itu nilai median lebih kecil dari nilai *mean*, maka dapat diartikan nilai ukuran perusahaan tinggi.

Tabel 4.4 Hasil Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan

Firm Size					
	Interval	Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	25.216-26.801	27	16.7	16.7	Kecil
	26.802-29.881	105	64.8	64.8	Menengah
	29.882-31.867	30	18.5	18.5	Besar
	Total	162	100.0	100.0	

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 143

Tabel 4.4 menunjukkan hasil statistik distribusi frekuensi ukuran perusahaan dimana ada 27 atau 16,7% unit analisis yang memiliki nilai *log* normal total aset pada kategori kecil dan 105 atau 64,8% unit analisis yang memiliki nilai *log* normal aset pada kategori menengah serta 30 atau 18,5% berada pada kategori besar. Secara umum perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam katagori menengah.

4.1.2.3 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pengukuran atas variabel dewan komisaris dilakukan berdasarkan jumlah rapat dewan komisaris. Hasil analisis statistik dapat dilihat dalam Tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Dewan Komisaris
Descriptive Statistic**

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
DK	162	18.000	1.000	8.506	9.000	3.725
Valid N (Listwise)	162					

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 144

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian sebanyak 162 yang diperoleh dari *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018. Nilai maksimum rapat dewan komisaris sebanyak 18 kali dan nilai minimum sebanyak 1 kali rapat. Nilai maksimum dimiliki oleh perusahaan Arwana Citra Mulia Tbk dimana perusahaan tersebut mengadakan rapat pada 3 tahun berturut-turut sebanyak 18 kali, Surya Toto Indonesia Tbk pada tahun 2018, Asiaplast Industries Tbk pada tahun 2016 dan Selamat Sempurna Tbk pada tahun 2016. sedangkan nilai minimum dimiliki oleh perusahaan Tri Banyan Tirta dimana mengadakan rapat hanya 1 kali pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dan Perusahaan Darya Varia Laboratoria Tbk mengadakan rapat 1 kali pada tahun 2017 dan 2018.

Dewan komisaris memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebanyak 8,506 dalam mengadakan rapat, sedangkan nilai median sebesar 9,000. Kemudian untuk nilai

standar deviasi nya adalah 3,725, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) maka penyebaran data tersebut dikatakan berdistribusi secara merata. Selain itu nilai median lebih besar dari nilai *mean*, maka dapat diartikan nilai dewan komisaris rendah.

Tabel 4.6 Hasil Statistik Distribusi Frekuensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris					
Interval		Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	1-3	10	6,2	6,2	Tidak Sesuai Peraturan
	4-18	152	93,8	93,8	Sesuai Peraturan
	Total	162	100,0	100,0	

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 144

Dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dewan komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bisa dilaksanakan apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Tabel 4.6 menunjukkan hasil distribusi frekuensi dimana perusahaan yang mengadakan rapat tidak sesuai peraturan pemerintah ada 6,2% atau 10 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang sudah menjalankan rapat sesuai yang dengan peraturan pemerintah ada 93,8% atau 152 perusahaan. Secara umum perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah menjalankan rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017.

4.1.2.4 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Pengukuran atas variabel dewan komisaris independen dilakukan berdasarkan proporsi dewan komisaris independen dimana didapatkan dari

perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris kemudian di kali dengan 100%. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Dewan Komisaris Independen Descriptive Statistic

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
DKI	162	0.833	0.250	0.430	0.400	0.112
Valid N (Listwise)	162					

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 144

Perusahaan diharuskan mempunyai dewan komisaris independen minimal 30% atau minimal 1 orang komisaris independen dalam dewan. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian sebanyak 162 yang diperoleh dari *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018. Proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai maksimum sebesar 0,833 dan nilai minimum sebesar 0,250. Nilai maksimum 0,833 dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk sedangkan nilai minimum 0,250 dimiliki oleh perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,430, sedangkan nilai median sebesar 0,400. Kemudian untuk nilai standar deviasi nya adalah 0,112. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) maka penyebaran data tersebut dikatakan berdistribusi secara merata. Selain itu nilai median lebih besar dari nilai *mean*, maka dapat diartikan nilai dewan komisaris independen rendah.

Tabel 4.8 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen					
	Interval	Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	0.250-0,299	4	2,5	2,5	Di bawah 30%
	0,300-0,833	158	97,5	97,5	Di atas 30%
	Total	162	100,0	100,0	

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 144

Tabel 4.8 menunjukkan hasil statistik distribusi frekuensi dewan komisaris independen unit analisis dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 162. Perusahaan yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen di bawah 30% sebanyak 2 perusahaan yaitu perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebesar 25% (2016) dan PT Semen Indonesia berturut-turut 28,6% (2016, 2017 dan 2018).

4.1.2.5 Reputasi Auditor

Reputasi Auditor merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Pengukuran atas variabel reputasi auditor dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, angka 1 akan diberikan kepada perusahaan yang menggunakan KAP *Big four* dan angka 0 akan diberikan kepada perusahaan yang menggunakan non KAP *Big four*. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Reputasi Auditor

Reputasi Auditor				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.000	93	57.4	57.4
	1.000	69	42.6	42.6
	Total	162	100.0	100.0

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 145

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian sebanyak 162 yang diperoleh dari *annual report* perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018. Nilai 1 adalah untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big four* yaitu sebanyak 69 perusahaan seperti PT Asahimas Flat Glass Tbk yang menggunakan KAP Siddharta Widjaja & Rekan member dari KPMG berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018, PT Asiaplast Industries Tbk menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja member dari Ernst & Young selama tahun 2016, 2017 dan 2018, PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja member dari Ernst & Young selama tahun 2016, 2017 dan 2018.

Sedangkan nilai 0 adalah nilai yang menunjukkan perusahaan yang menggunakan KAP non *Big four* yang dimiliki sebanyak 93 perusahaan seperti PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk menggunakan KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan member dari BDO International berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk menggunakan KAP Hendrawinata, Eddy Siddharta & Ranzil member dari KAESTON pada tahun 2016, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono member dari NEXIA International pada tahun 2017 dan 2018, PT Jembo Cable Company Tbk menggunakan KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan member dari BDO International berturut-turut pada tahun 2016 sampai 2018.

4.1.2.6 Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko merupakan variabel moderating dalam penelitian ini. Komite manajemen risiko diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan diberi nilai 1

kemudian nilai 0 apabila perusahaan tidak memiliki komite manajemen risiko.

Hasil analisis statistik deskriptif bisa dapat dilihat pada Tabel 4.10:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi KMR

KMR				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.000	134	82.7	82.7
	1.000	28	17.3	17.3
	Total	162	100.0	100.0

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 145

Tabel 4.10 menunjukkan hasil statistik distribusi komite manajemen risiko dimana nilai 1,000 adalah perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko yaitu sebanyak 28 perusahaan atau 17,3% perusahaan manufaktur yang mempunyai komite manajemen risiko diantaranya seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk dan PT Asahimas Flat Glass Tbk, PT Surya Toto Indonesia Tbk, PT Aneka Gas Industri Tbk dan PT Budi Starch and Sweetener Tbk berturut-turut pada tahun 2016 sampai 2018.

Sedangkan nilai 0 adalah perusahaan yang belum memiliki komite manajemen risiko yaitu sebanyak 134 atau 82,7% perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai komite manajemen risiko seperti PT Arwana Citra Mulia Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk, PT Beton Jaya Manunggal Tbk, PT Gunawan Dianjaya Steel dan PT Lionmesh Prima Tbk. Secara umum perusahaan manufaktur di Indonesia belum mempunyai komite manajemen risiko, Hal ini disebabkan karena keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan non keuangan sifatnya masih sukarela.

4.1.2 Analisis Statistik Inferensial

4.1.2.1 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2018:227). Hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.146		-.031	.975
	Firm Size	.029	.005	.509	5.551	.000
	Dewan Komisaris	.006	.002	.242	3.065	.003
	Komisaris Independen	-.043	.066	-.055	-.654	.514
	Reputasi Auditor	-.044	.017	-.246	-2.599	.110
	Komite Manajemen Risiko	.133	.441	.576	.302	.763
	Moderasi 1	-.008	.015	-1.015	-.519	.604
	Moderasi 2	.012	.005	.466	2.316	.022
	Moderasi 3	.279	.130	.567	2.150	.033
	Moderasi 4	.112	.038	.420	2.981	.003

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 142

Hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) pada Tabel 4.11 dapat disimpulkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$ERM = -0,005 + 0,029 \text{ FIRM SIZE} + 0,006 \text{ DK} - 0,043 \text{ DKI} - 0,044 \text{ RA} + 0.133$$

$$\text{KMR} - 0,008 \text{ X1*Z} + 0,012 \text{ X2*Z} + 0,279 \text{ X3*Z} + 0,112 \text{ X4*Z} + e$$

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta = $-0,005$ artinya jika semua variabel independen yaitu ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor bernilai (0) atau konstan, maka terjadi penurunan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar $-0,005$.
2. Koefisien regresi linier ukuran perusahaan sebesar $0,029$ dan menunjukkan tanda positif. Artinya, semakin besar perusahaan maka semakin luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna jika \ln total aset perusahaan naik sebesar satu \ln total aset maka menyebabkan kenaikan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar $0,029$, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan
3. Koefisien regresi linier dewan komisaris sebesar $0,006$ dan menunjukkan tanda positif. Artinya, semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris maka semakin luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna jika rapat dewan komisaris naik satu (1) kali rapat maka terjadi kenaikan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar $0,006$, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan
4. Koefisien regresi linier dewan komisaris independen sebesar $-0,043$ dan menunjukkan angka negatif. Artinya, semakin sedikit proporsi dewan komisaris independen maka semakin luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna jika proporsi dewan komisaris independen turun 1% terjadi peningkatan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar $-0,043$, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan
5. Koefisien regresi linier reputasi auditor sebesar $-0,044$ dan menunjukkan angka negatif. Artinya perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* maka luas

pengungkapan manajemen risikonya semakin rendah. Angka ini memiliki makna jika perusahaan menggunakan KAP *Big Four* maka terjadi penurunan pengungkapan manajemen risiko sebesar -0,044, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan

6. Koefisien regresi variabel interaksi antara ukuran perusahaan dengan komite manajemen risiko sebesar -0,008 dan menunjukkan tanda negatif. Artinya semakin rendah variabel interaksi antara ukuran perusahaan dengan komite manajemen risiko maka semakin luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna apabila terjadi penurunan variabel interaksi antara ukuran perusahaan dengan komite manajemen risiko sebesar satu (1) satuan, maka menyebabkan penurunan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar -0,008.
7. Koefisien regresi variabel interaksi antara dewan komisaris dengan komite manajemen risiko sebesar 0,012 dan menunjukkan tanda positif. Artinya semakin tinggi variabel interaksi antara dewan komisaris dengan komite manajemen risiko maka semakin tinggi luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna apabila terjadi peningkatan variabel interaksi antara dewan komisaris dengan komite manajemen risiko sebesar satu (1) satuan, maka menyebabkan peningkatan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,012, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan
8. Koefisien regresi variabel interaksi antara dewan komisaris independen dengan komite manajemen risiko sebesar 0,279 dan menunjukkan tanda positif. Artinya semakin tinggi variabel interaksi antara dewan komisaris independen dengan komite manajemen risiko maka semakin tinggi luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna apabila terjadi peningkatan variabel interaksi

antara dewan komisaris independen dengan komite manajemen risiko sebesar satu (1) satuan, maka menyebabkan peningkatan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,279, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan

9. Koefisien regresi variabel interaksi antara reputasi auditor dengan komite manajemen risiko sebesar 0,112 dan menunjukkan tanda positif. Artinya semakin tinggi variabel interaksi antara reputasi auditor dengan komite manajemen risiko maka semakin tinggi luas pengungkapan manajemen risiko. Angka ini memiliki makna apabila terjadi peningkatan variabel interaksi antara reputasi auditor dengan komite manajemen risiko sebesar satu (1) satuan, maka menyebabkan peningkatan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,112, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, apabila nilai *Asymp-Sig (2-tailed)* lebih dari nilai *alpha* (α) 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai *Asymp-Sig (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018:30). Hasil uji normalitas bisa dilihat pada Tabel 4.12:

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		162
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08020103
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.061
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 141

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,64 dengan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,099. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Gozali, 2018:107). Penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$, maka dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	Firm Size	.702	1.424
	Dewan Komisaris	.970	1.031
	Komisaris Independen	.989	1.011
	Reputasi Auditor	.716	1.397
a. Dependent Variable: Pengungkapan Manajemen Risiko			

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 141

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji multikolinearitas dimana seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin Watson* (D-W). Uji ini dapat diketahui apabila tingkat $\alpha = 5\%$ dan nilai D-W lebih besar dari d_u atau D-W lebih kecil dari $4-d_u$ (Ghozali, 2018:112). Tabel 4.14 merupakan hasil pengujian dari *Durbin-Watson* (D-W):

Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 ^a	.268	.224	.077405	1.705
a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Firm Size, Reputasi Auditor, KMR					
b. Dependent Variable: ERM					

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 141

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan hasil uji autokorelasi dimana nilai *Durbin-Watson* (D-W) sebesar 1,705 dengan tingkat $\alpha=5\%$. Variabel independen berjumlah 4 ($k=4$) dan data sampel 162 ($n=162$) dari 189 sampel dikurangi data *outlier* sebanyak 27, kemudian diperoleh nilai $du=1,6928$. Berdasarkan data tersebut nilai D-W (1,705) lebih dari du (1,6928) dan nilai D-W (1,705) kurang dari $4-du$ ($4-1,6928$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat autokorelasi.

4.1.3.4 Uji Heterokedastisitas

Salah satu pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *glejser*. *Uji glejser* dapat dilakukan dengan meregresi nilai absolut terhadap variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2018:142). Hasil uji heteroskedastisitas bisa dilihat dalam Tabel 4.15:

Tabel 4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.151	.081		1.872	.063
	Firm Size	-.003	.003	-.093	-.904	.367
	Dewan Komisaris	.001	.001	.062	.705	.482
	Komisaris Independen	-.048	.036	-.124	-1.313	.191
	Reputasi Auditor	.000	.009	-.002	-.023	.982

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 142

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glesjer* dimana seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen dengan dimoderasi oleh variabel moderating. Jika nilai Sig. < α (0,05), maka ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179). Hasil uji F bisa dilihat dalam Tabel 4.16 di bawah ini:

Tabel 4.16 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.333	9	.037	6.169	.000 ^b
	Residual	.911	152	.006		
	Total	1.243	161			
a. Dependent Variable: ERM						
b. Predictors: (Constant), Moderasi 4, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Firm Size, Reputasi Auditor, Moderasi 2, Moderasi 3, KMR, Moderasi 1						

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 139

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000, dimana nilai tersebut kurang dari α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan di moderasi oleh komite manajemen risiko.

4.1.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (uji t) bertujuan untuk menguji seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara parsial/individual. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) berarti secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2018:179). Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Berdasarkan Tabel 4.17 maka dapat disimpulkan hasil dari uji t sebagai berikut:

1. Variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan arah hubungan positif. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hasil ini menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Variabel dewan komisaris memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 dengan arah hubungan positif. Nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Variabel dewan komisaris independen memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,514 dengan arah hubungan negatif. Nilai signifikansi $0,514 > 0,05$ hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) ditolak.
4. Variabel reputasi auditor memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,110 dengan arah hubungan negatif. Nilai signifikansi $0,110 > 0,05$ hasil ini menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat (H4) ditolak.
5. Variabel moderasi komite manajemen risiko pada ukuran perusahaan dan pengungkapan manajemen risiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,604 dengan arah hubungan negatif. Nilai signifikansi $0,604 > 0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa komite manajemen risiko tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak.

6. Variabel moderasi komite manajemen risiko pada dewan komisaris dan pengungkapan manajemen risiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,022 dengan arah hubungan positif. Nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ hasil ini menunjukkan bahwa komite manajemen risiko memperlemah pengaruh antara dewan komisaris terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) ditolak.
7. Variabel moderasi komite manajemen risiko pada dewan komisaris independen dan pengungkapan manajemen risiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,033 dengan arah hubungan positif. Nilai signifikansi $0,033 < 0,05$ hasil ini menunjukkan bahwa komite manajemen risiko memperlemah pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketujuh (H7) ditolak.
8. Variabel moderasi komite manajemen risiko pada reputasi auditor dan pengungkapan manajemen risiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 dengan arah hubungan positif. Nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa komite manajemen risiko memperlemah pengaruh reputasi auditor terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedelapan (H8) ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan dalam Tabel 4.21 berikut ini:

Tabel 4.17 Simpulan Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	α	β	Sig.	Hasil
1.	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	0,029	0,000	Diterima
2.	Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	0,006	0,003	Diterima
3.	Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	-0,043	0,514	Ditolak
4.	Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	-0,044	0,110	Ditolak
5.	Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	-0,008	0,604	Ditolak
6.	Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	0,012	0,022	Ditolak
7.	Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	0,279	0,033	Ditolak
8.	Komite manajemen risiko memperkuat pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko.	0,05	0,112	0,003	Ditolak

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

4.1.4.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Squared)

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) bertujuan untuk mengukur sejauh mana model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R-Squared* kecil yang mendekati 0 artinya kemampuan variasi variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai *Adjusted R-Squared* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,517 ^a	,268	,224	,077405

a. Predictors: (Constant), KMR, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Reputasi Auditor, Firm Size, Moderasi 1, Moderasi 2, Moderasi 3, Moderasi 4
Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 140

Tabel 4.18 menunjukkan hasil dari koefisien determinasi nilai dari *Adjusted R-Squared* 0,224. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan reputasi auditor mempengaruhi variabel dependen pengungkapan manajemen risiko sebesar 22,4% dan sisanya 77,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.1.4.4 Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur faktor manakah yang paling berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai r^2 yang besar menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari r^2 :

Tabel 4.19 Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a				
Model		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)			
	Firm Size	.374	.423	.400
	Dewan Komisaris	.180	.240	.212
	Komisaris Independen	.071	-.054	-.046
	Reputasi Auditor	.164	-.205	-.179
	Moderasi 1	.118	-.124	-.107
	Moderasi 2	.102	-.199	-.174
	Moderasi 3	.166	.177	.154
	Moderasi 4	.201	.234	.206

a. Dependent Variable: ERM

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, Pada lampiran halaman 140

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan hasil dari koefisien dterminasi parsial (r^2) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,423 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah sebesar 18,6% Hal tersebut memiliki arti bahwa 18,6% dari variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan.
2. Dewan komisaris menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,240 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel dewan komisaris dalam penelitian ini adalah sebesar 5,76% Hal tersebut memiliki arti bahwa 5,76% dari variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh dewan komisaris.
3. Dewan komisaris independen menunjukkan bahwa nilai parsial adalah -0,054 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel dewan komisaris

independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,29% Hal tersebut memiliki arti bahwa 0,29% dari variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh dewan komisaris independen.

4. Reputasi auditor menunjukkan bahwa nilai parsial adalah -0,205 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel reputasi auditor dalam penelitian ini adalah sebesar 4,2% Hal tersebut memiliki arti bahwa 4,2% dari variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh reputasi auditor.
5. Interaksi ukuran perusahaan dengan komite manajemen risiko menunjukkan bahwa nilai parsial adalah -0,124 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel interaksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah sebesar 3,9% Hal tersebut memiliki arti bahwa 3,9% dari variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh interaksi ukuran perusahaan dengan komite manajemen risiko.
6. Interaksi dewan komisaris dengan komite manajemen risiko menunjukkan bahwa nilai parsial adalah -0,199 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel interaksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah sebesar 3,1% Hal tersebut memiliki arti bahwa 3,1% dari variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh interaksi dewan komisaris dengan komite manajemen risiko.
7. Interaksi dewan komisaris independen dengan komite manajemen risiko menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,177 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel interaksi dewan komisaris independen dalam penelitian ini adalah sebesar 2,3% Hal tersebut memiliki arti bahwa 2,3% dari

variabel pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh interaksi dewan komisaris independen dengan komite manajemen risiko.

8. Interaksi reputasi auditor dengan komite manajemen risiko menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,234 yang berarti nilai koefisien determinasi (r^2) variabel interaksi reputasi auditor dalam penelitian ini adalah sebesar 5,4%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 5,4% reputasi auditor dengan komite manajemen risiko.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan “ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko” diterima. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka luas pengungkapan manajemen risiko semakin tinggi. Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka luas pengungkapan manajemen risikonya juga semakin rendah.

Agensi teori mampu menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini, perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar karena lebih sulit untuk dilakukan tindakan *monitoring* (Beasley et al.,2005). Semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks pula kegiatan ataupun proses bisnis dalam perusahaan tersebut oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih banyak mengungkapkan risiko (Ulfa, 2018).

Semakin besar ukuran perusahaan atau industri maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Hal ini yang menyebabkan pengungkapan manajemen risiko semakin luas dan informasi yang diberikan juga akan semakin akurat dan lengkap. Pengungkapan informasi yang luas akan mempermudah kreditur untuk memperoleh informasi perusahaan secara detail. Hal ini juga akan membantu para investor dalam membuat keputusan investasi.

Penerimaan hipotesis ini juga didukung dengan data *riil* yang ada pada sampel penelitian. PT Waskita Beton Precast Tbk pada tahun 2016 memiliki *log* normal total aset yaitu 30,251 dimana perusahaan tersebut termasuk dalam kategori besar dan luas pengungkapan manajemen risiko yaitu 0,838. Kemudian untuk tahun 2017 mempunyai *log* normal total aset sebesar 30,334 dengan luas pengungkapan manajemen sebesar 0,892. Nilai tersebut menurut Tabel 4.1 nilainya di atas rata-rata tingkat pengungkapan manajemen risiko perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Sedangkan pada PT Beton Jaya Manunggal Tbk pada tahun 2016 memiliki nilai *log* normal total aset 25,901 dimana perusahaan tersebut dalam kategori kecil dan luas pengungkapan manajemen risikonya sebesar 0,703. Kemudian untuk tahun 2017 dan 2018 memiliki nilai *log* normal total aset sebesar 25,935 dan 26,105 dengan luas pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,676. Nilai tersebut masih di bawah rata-rata nilai pengungkapan manajemen risiko perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang mempunyai total aset yang besar ternyata menyampaikan pengungkapan manajemen risiko yang lebih luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Zakiyah (2017) serta Kencana dan Lastanti (2018) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyanningsih dan Gunawan (2016) serta Khumairoh & Agustina (2017) dimana penelitian tersebut menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

4.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko” diterima. Artinya semakin banyak dewan komisaris mengadakan rapat maka luas pengungkapan manajemen risiko semakin tinggi. Sebaliknya semakin kecil intensitas rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris maka luas pengungkapan manajemen risikonya juga semakin rendah.

Teori agensi mampu menjelaskan pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan teori ini keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh jumlah rapat dewan komisaris. Hal ini disebabkan karena jumlah rapat dewan komisaris mempunyai manfaat kapasitas *monitoring*, pemberian informasi yang efektif serta mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan manajemen risiko (Cecasmis & Samin, 2016). Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan semakin efektif pula dewan komisaris

dalam mengawasi manajemen agar tidak ada informasi yang disembunyikan dalam pengungkapan manajemen risiko.

Penerimaan hipotesis ini juga didukung oleh data *riil* yang ada pada sampel penelitian. PT Astra International Tbk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mengadakan rapat sebanyak 6 kali dan luas pengungkapan manajemen risikonya sebesar 0,892. Nilai tersebut berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai pengungkapan manajemen risikonya di atas rata-rata. Sedangkan PT Tri Banyan Tirta Tbk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 hanya melakukan rapat sebanyak 1 kali dan nilai pengungkapan manajemen risikonya sebesar 0,753, dimana nilai tersebut masih di bawah rata-rata luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang dewan komisaris nya mengadakan rapat lebih sering akan menyampaikan pengungkapan manajemen risiko yang lebih luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Gunawan (2016), Syaifurakhman dan Laksito (2016) serta Wicaksono dan Adiwibowo (2017) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh positif antara dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Zakiyah (2017) serta Nurcahyani (2016) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

4.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan “dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap

pengungkapan manajemen risiko” ditolak. Hal tersebut memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Teori agensi yang menjelaskan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan tidak mampu menjelaskan pengaruh hubungan antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan manajemen risiko. Besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi luas pengungkapan manajemen risiko. Hal ini mungkin dikarenakan kualitas fungsi pengawasan dan *monitoring* bukan ditentukan dari proporsi dewan komisaris independen melainkan bisa dari kualitas dan latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris independen (Meizaroh dan Lucynda, 2011). Adanya komisaris independen dalam perusahaan untuk memenuhi regulasi dari pemerintah, dimana perusahaan diharuskan mempunyai minimal 30% atau minimal 1 orang komisaris independen dalam dewan sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang baik dan tidak menggunakan independensi nya untuk mengawasi kebijakan direksi (Pangestuti dan Susilowati, 2017).

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dibuktikan dengan data pada sampel penelitian. Perusahaan yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen di bawah 30% mempunyai nilai rata-rata pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,852 dimana nilai tersebut di atas nilai rata-rata pengungkapan manajemen risiko. Perusahaan tersebut diantaranya yaitu PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebesar 25% (2016) dan

PT Semen Indonesia berturut-turut 28,6% (2016, 2017 dan 2018). Sedangkan perusahaan yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen di atas 30% memiliki nilai rata-rata pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,813, nilai tersebut masih di bawah rata-rata nilai pengungkapan manajemen risiko. Perusahaan tersebut seperti PT Beton Jaya Manunggal Tbk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 memiliki persentase proporsi dewan komisaris independen sebesar 50%, PT Ekadharma International Tbk memiliki persentase proporsi dewan komisaris independen sebesar 50% dan PT Aneka Gas Industri Tbk memiliki persentase proporsi dewan komisaris independen sebesar 33%. Hal tersebut membuktikan bahwa proporsi jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi luas pengungkapan manajemen risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nurcahyani (2016) dan Dessender (2010) yang menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) serta Achmad et al (2017) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

4.2.4 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan “reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko” ditolak. Hal tersebut memberikan bukti empiris

bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan yang diaudit oleh perusahaan audit berkualitas tinggi seperti auditor *Big four* akan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait manajemen risiko tidak mampu menjelaskan pengaruh hubungan antara reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *Big four* bukan jaminan akan mengungkapkan lebih luas pengungkapan manajemen risiko (Ulfa, 2018).

Perusahaan yang sudah menggunakan KAP *Big four* biasanya sudah mendapat kepercayaan dari *stakeholder* atau dari masyarakat, sehingga perusahaan tersebut hanya melakukan pengungkapan sukarela saja sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak menggunakan KAP *Big four* berusaha melakukan pengungkapan manajemen risiko yang lebih luas dengan tujuan dapat menambah kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap perusahaan (Sulistiyangsih dan Gunawan, 2016).

Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dibuktikan dengan data pada sampel penelitian. Perusahaan yang menggunakan KAP *Big four* mempunyai nilai rata-rata pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,819 dimana nilai tersebut masih di bawah rata-rata nilai pengungkapan manajemen risiko. Perusahaan tersebut seperti PT Asahimas Flat Glass Tbk menggunakan KAP Siddharta Widjaja & Rekan *member* dari KPMG berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018, PT Asiaplast Industries Tbk

menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja *member* dari Ernst & Young selama tahun 2016, 2017 dan 2018, PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja *member* dari Ernst & Young selama tahun 2016, 2017 dan 2018.

Sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan KAP *Big four* mempunyai nilai rata-rata pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,848, nilai tersebut di atas rata-rata pengungkapan manajemen risiko, Seperti PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk menggunakan KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan *member* dari BDO International berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk menggunakan KAP Hendrawinata, Eddy Siddharta & Ranzil *member* dari KAESTON pada tahun 2016, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono *member* dari NEXIA International pada tahun 2017 dan 2018, PT Jembo Cable Company Tbk menggunakan KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan *member* dari BDO International berturut-turut pada tahun 2016 sampai 2018. Hal ini membuktikan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh dengan luas pengungkapan manajemen risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sulistyaningsih & Gunawan (2016) serta Ulfa (2018) yang menunjukkan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Kencana dan Lastanti (2018) serta Gunawan & Zakiyah (2017) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

4.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan “komite manajemen risiko memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko” ditolak. Teori agensi gagal menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko. Dalam penelitian ini komite manajemen risiko tidak bisa memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko. Rata-rata perusahaan yang mempunyai komite manajemen risiko lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai komite manajemen risiko hal tersebut dibuktikan dengan Tabel 4.10 hasil analisis distribusi frekuensi yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai komite manajemen risiko sebesar 17,3%.

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa rata-rata perusahaan baik itu perusahaan besar, menengah maupun kecil belum tentu mempunyai komite manajemen risiko, karena keberadaan komite manajemen risiko dalam perusahaan non keuangan masih bersifat sukarela. Sehingga komite manajemen risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko.

4.2.6 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H6) yang menyatakan “komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko” ditolak. Artinya komite

manajemen risiko memperlemah pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Teori agensi mampu menjelaskan pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan di moderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori ini, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan. Semakin banyak komite yang terdapat dalam struktur *corporate governance* maka akan membutuhkan fungsi pengawasan yang lebih intensif. Dimana akan semakin banyak rapat dewan komisaris yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, termasuk pengawasan terhadap komite manajemen risiko. Sehingga semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan semakin efektif pula dewan komisaris mengawasi kinerja dari komite manajemen risiko.

Komite manajemen risiko merupakan komite yang membantu dewan komisaris dalam mengawasi dan mengelola pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Salah satu tugas dari komite manajemen risiko adalah melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian komite manajemen risiko akan memberikan saran kepada dewan komisaris pada setiap rapatnya mengenai risiko apa saja yang perlu diungkapkan dalam manajemen risiko. Teori agensi berasumsi bahwa sifat manusia salah satunya adalah menghindari dan meminimalkan risiko-risiko yang terjadi, dalam hal ini dewan komisaris dan komite manajemen risiko sebagai agen sehingga risiko yang akan diungkapkan semakin sedikit dengan

adanya pertimbangan, perbaikan dan penyempurnaan dari komite manajemen risiko tersebut. Maka dapat disimpulkan komite manajemen risiko memperlemah hubungan antara dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko.

Hal ini dibuktikan dengan data sampel penelitian dimana perusahaan Aneka Gas Industri Tbk mempunyai intensitas rapat dewan komisaris sebanyak 11 kali pada tahun 2016 serta tahun 2017 dan 2018 berturut-turut sebanyak 10 kali. Perusahaan tersebut juga mempunyai komite manajemen risiko dari tahun 2016-2018 dan melakukan pengungkapan manajemen risiko di bawah rata-rata sebanyak 0,757 pada tahun 2016 dan 0,784 pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk yang mempunyai intensitas rapat yang hampir sama dengan Aneka Gas Industri Tbk yaitu sebanyak 11 kali pada tahun 2016, 12 kali pada tahun 2017 dan 10 kali pada tahun 2018. Namun perusahaan tersebut tidak memiliki komite manajemen risiko pada tahun 2016-2018 justru melakukan pengungkapan manajemen risiko di atas rata-rata yaitu sebanyak 0,973 pada tahun 2016-2018. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memperlemah hubungan antara dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko.

4.2.7 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan “komite manajemen risiko memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko” ditolak. Artinya

komite manajemen risiko memperlemah pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Teori agensi mampu menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori ini, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis serta hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Sehingga keberadaan komisaris independen bisa meningkatkan kualitas pengawasan salah satunya terhadap pengungkapan manajemen risiko. Selain itu adanya pihak independen merupakan cara bagi stakeholder dalam memberi pengaruh terhadap perusahaan. Komisaris independen menganggap pembentukan komite manajemen risiko sebagai suatu hal yang penting dan dapat membantu tugas pengawasannya dalam memantau manajemen risiko perusahaan. Besarnya proporsi komisaris independen merupakan sumber daya perusahaan untuk dapat meminimalkan biaya agensi yang terjadi akibat konflik agensi tersebut. Sehingga keberadaan komite manajemen risiko akan memberi kontrol kuat terkait dengan analisis risiko-risiko yang terjadi di perusahaan. Teori agensi berasumsi bahwa sifat

manusia salah satunya adalah menghindari dan meminimalkan risiko-risiko yang terjadi, dalam hal ini komite manajemen risiko sebagai agen dan memiliki tugas salah satunya adalah melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Sehingga risiko yang akan diungkapkan semakin sedikit dengan adanya pertimbangan, perbaikan dan penyempurnaan dari komite manajemen risiko tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa komite manajemen risiko memperlemah hubungan antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan manajemen risiko.

Hal ini dibuktikan dengan data sampel penelitian pada perusahaan Indofarma (Persero) Tbk mempunyai proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,333 berturut-turut pada tahun 2016-2018. Perusahaan tersebut juga mempunyai komite manajemen risiko dari tahun 2016-2018 dan melakukan pengungkapan manajemen risiko di bawah rata-rata sebanyak 0,757 pada tahun 2016-2018. Sedangkan perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk yang mempunyai proporsi dewan komisaris independen yang hampir sama dengan Indofarma (Persero) Tbk yaitu sebesar 0,333 pada tahun 2016-2017 dan 0,400 pada tahun 2018. Namun perusahaan tersebut tidak memiliki komite manajemen risiko pada tahun 2016-2018 justru melakukan pengungkapan manajemen risiko di atas rata-rata yaitu sebanyak 0,946 pada tahun 2016-2018. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memperlemah hubungan antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan manajemen risiko.

4.2.8 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan di moderasi oleh Komite Manajemen Risiko.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan “komite manajemen risiko memperkuat pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko” ditolak. Artinya komite manajemen risiko memperlemah pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Teori agensi mampu menjelaskan pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan di moderasi oleh komite manajemen risiko. Menurut teori ini, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik yaitu salah satunya dengan adanya komite manajemen risiko di perusahaan.

Komite manajemen risiko merupakan komite yang membantu dewan komisaris dalam mengawasi dan mengelola pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Salah satu tugas dari komite manajemen risiko adalah melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Auditor *Big Four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Auditor *Big four* dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen et al., 2009). Kemudian internal auditor akan memberikan informasi tersebut kepada komite manajemen risiko yang akan digunakan untuk menganalisis risiko-

risiko perusahaan di masa yang akan datang. Teori agensi berasumsi bahwa sifat manusia salah satunya adalah menghindari dan meminimalkan risiko-risiko yang terjadi, dalam hal ini komite manajemen risiko sebagai agen berupaya untuk menganalisis dan memilih kembali risiko apa saja yang telah disarankan oleh auditor eksternal. Sehingga risiko yang akan diungkapkan semakin sedikit dengan adanya pertimbangan, perbaikan dan penyempurnaan dari komite manajemen risiko tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan data sampel penelitian pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk yang menggunakan jasa KAP *Big Four* berturut-turut pada tahun 2016-2018. Perusahaan tersebut juga mempunyai komite manajemen risiko dari tahun 2016-2018 dan melakukan pengungkapan manajemen risiko di bawah rata-rata sebanyak 0,757 pada tahun 2016-2018. Sedangkan perusahaan Astra International Tbk yang juga menggunakan jasa KAP *Big Four* pada tahun 2016-2018. Namun perusahaan tersebut tidak memiliki komite manajemen risiko pada tahun 2016-2018 justru melakukan pengungkapan manajemen risiko di atas rata-rata yaitu sebanyak 0,892 pada tahun 2016-2018. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memperlemah hubungan antara reputasi auditor dengan pengungkapan manajemen risiko.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung akan mengungkapkan lebih luas informasi mengenai manajemen risiko.
2. Dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka semakin efektif pula dewan komisaris dalam melakukan *monitoring*, sehingga informasi mengenai manajemen risiko yang diberikan akan semakin luas.
3. Dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Adanya komisaris independen dalam perusahaan untuk memenuhi regulasi dari pemerintah sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang baik dan tidak menggunakan independensi nya untuk mengawasi kebijakan direksi.
4. Reputasi auditor terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Perusahaan yang sudah menggunakan KAP *Big four* biasanya sudah mendapat kepercayaan dari *stakeholder* atau dari masyarakat,

sehingga perusahaan tersebut hanya melakukan pengungkapan sukarela saja sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

5. Komite manajemen risiko tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.
6. Komite manajemen risiko tidak mampu memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.
7. Komite manajemen risiko tidak mampu memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.
8. Komite manajemen risiko tidak mampu memperkuat pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, keterbatasan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hanya perusahaan manufaktur sehingga tidak bisa mencerminkan keseluruhan perusahaan di Indonesia dan tidak bisa menjadi dasar generalisasi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya bisa memperluas sampel penelitian dengan menggunakan seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebagai referensi untuk menjadi pertimbangan dengan melihat variabel ukuran perusahaan dalam pemilihan perusahaan yang akan dijadikan untuk menanamkan modalnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas. Berdasarkan penelitian ini semakin besar ukuran perusahaan maka akan memotivasi manajemen dalam mengungkapkan informasi manajemen risiko yang lebih luas, sehingga akan meminimalkan risiko yang akan terjadi.
3. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih cukup rendah yaitu 22,4% yang dapat diartikan variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen hanya sebesar 22,4% sedangkan 77,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain terkait pengungkapan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Shukor, Z. A., Mohamed, Z. M., & Ahmad, A. (2015). Risk management disclosure: A study on the effect of voluntary risk management disclosure. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Abraham , S., & Cox, P. (2007). Analysing of Determinants Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual Reports. *The British Accounting Review*.
- Achmad, e. a. (2017). Factors Influencing Voluntary Corporate Risk Disclosure Practices By Indonesian Companies. *Journal Of Economic Literature*.
- Adam, e. a. (2016). Company Characteristics And Enterprise Risk Management Disclosure: Empirical Study on Indonesia Listed Companies. *International Journal of applied Bussines and Economic Research* .
- Agus, R. (2019). Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Modal Intelektual dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017). *Skripsi Unnes*.
- AlMaghzom, Abdullah, Hussainey, Khaled, & Aly, D. (2016). Corporate Governance and Risk Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Corporate Ownership and Control*.
- Amran, A., Bin, A., & Hassan, B. (2009). An exploratory study of risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal*.
- Asmoro, A., Majidah, & Mahardika, D. (2016). Analisis Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi pada Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX30 di BEI periode 2012-2014) . *e-Proceeding of Management*.
- Bates, W., & Leclerc, R. (2009). Boards of Directors and Risk Committees. *The Corporate Governance Advisor*.
- Beasley, M. S., Clune, R., & Hermanson, D. R. (2005). Enterprise risk management: An empirical analysis of factors associated with the extent of implementation. *Journal of Accounting and Public*.
- Cecasmı, J. A., & Samin. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Leverage, Struktur Kepemilikan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM). *Artikel Ilmiah*.
- Chen, L., Kilgore, A., & Radich, R. (2009). Audit Committees: Voluntary Formation by ASX Non-Top 500. *Managerial Auditing Journal*.

- Desender, K. (2010). On the Determinants of Enterprise Risk Management Implementation. *Managing Worldwide Operations & Communications with Information Technology*.
- Dewi, Z. C. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Artikel Skripsi*.
- Dharmastuti, C. F. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Internal dan External Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Perusahaan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Faisal, A. F., & Ghozali, I. (2018). Karakteristik Dewan Komisaris, Komite dan Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Gunawan, B., & Zakiyah, Y. N. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Risk Management Disclosure. *Ekspansi*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Cetakan ke-12*. Yogyakarta: BPF.
- Ismail, M. N. (2020). Determinan dan Konsekuensi Internet Financial Reporting . *Skripsi*.
- Jannah, I. M. (2016). Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Artikel Ilmiah*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kencana, A., & Lastanti, S. H. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko. *Seminar Nasional Pakar 1 Tahun 2018*.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta. (2000). *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa*. Jakarta.

- Keputusan Ketua Bappepam. (2012). *Keputusan Ketua Bappepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan pada Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta.
- Khumairoh, N., & Agustina, L. (2017). The Roles of The Board of Commissioner in Moderating Factors Affeting The Disclosure Of Enterprise Risk Management. *Accounting Analisys Journal*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2011). *Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance*. Retrieved from www.google.com.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2004). *Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2004 Tentang Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Komite Nasional Kebijakan Governance 2006 tentang Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*; Jakarta.
- KPMG. (2001). *Enterprise Risk Management : An Emerging Model for Building*. Retrieved from www.google.com.
- Linsley, P. M., & Shrives, P. J. (2014). Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. *The British Accounting Review*.
- Meizaroh, & Jurica. (2011). Pengaruh corporate governance dan konsentrasi kepemilikan pada pengungkapan enterprise risk management. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Michael, S. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Nurchayani, I. (2018). Analisis Pengungkapan Manajemen Risiko: Studi Empiris di Jakarta Islamic Index (JII) Periode Tahun 2014-2016. *Skripsi*.
- Pangestuti, K. D., & Susilowati, Y. (2017). Komisaris Independen, Reputasi Auditor, Konsentrasi Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* , 164-175.
- Pariati, N., Badera, D., Astika, D., & Budiarta, D. (2018). The Influence of Good Corporate Governance on the Enterprise Risk Management Disclosure and the Implications on Firm Value. *The International Journal of Business and Manajement*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan . (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek*. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (2017). *PSAK No. 60 (Revisi 2017) tentang Instrumen Keuangan*. Jakarta.
- Setiawan, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan Consumer Goods di BEI Periode 2010-2015. *Artikel Ilmiah*.
- Subramaniam, e. a. (2009). Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies. *Managerial Auditing Journal*.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulistyaningsih, & Gunawan, B. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Risk Management Disclosure. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta.
- Syaifurakhman, B., & Laksito, H. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Syifa, L. (2013). Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.
- Ulfa, N. (2018). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Skripsi UII*.
- Undang-undang Perseroan Terbatas. (2007). *Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*. Jakarta.

- Undang-undang Republik Indonesia. (2007). *UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian: Penelitian Bisnis & Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Wicaksono, S. A., & Adiwibowo, A. S. (2017). Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Widhiawati, & Halmawati. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017) . *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*.
- Yunifa, L., & Juliarto, A. (2017). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	KODE	Nama Perusahaan
1	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
2	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk
3	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
4	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk
5	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
6	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk
7	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk
8	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
9	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
10	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
11	BUDI	Budi Starch and Sweetener Tbk
12	EKAD	Ekadharma International Tbk
13	INCI	Intan Wijaya International Tbk
14	SRSN	Indo Acitama Tbk
15	AKPI	Argha Karya Prima Industri Tbk
16	APLI	Asiaplast Industries Tbk
17	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
18	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
19	TRST	Trias Sentosa Tbk
20	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk
21	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk
22	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
23	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
24	SIPD	Sierad Produce Tbk
25	TIRT	Tirta Mahakam Resources
26	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
27	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
28	SPMA	Suparma Tbk
29	AMIN	Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk
30	ASII	Astra International Tbk
31	AUTO	Astra Otiparts Tbk
32	BOLT	Garuda Metalindo Tbk
33	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk
34	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
35	SMSM	Selamat Sempurna Tbk

36	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
37	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk
38	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
39	BATA	Sepatu Bata Tbk
40	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk
41	JECC	Jembo Cable Company Tbk
42	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
43	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
44	DLTA	Delta Djakarta Tbk
45	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
46	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
47	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
48	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
49	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
50	GGRM	Gudang Garam Tbk
51	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
52	RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk
53	WIIM	Wisnilak Inti Makmur Tbk
54	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
55	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
56	KLBF	Kalbe Kimia Farma Tbk
57	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
58	ADES	Akasha Wira International Tbk
59	KINO	Kino Indonesia Tbk
60	TCID	Mandom Indonesia Tbk
61	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
62	CINT	Chitose International Tbk
63	KICI	Kedaung Indah Can Tbk

Lampiran 2 Item Pengungkapan Manajemen Risiko

No	Kategori Risiko	Komponen
1	Risiko Keuangan	(1) Tingkat suku bunga (2) Tingkat kurs (3) Komoditas (4) Likuiditas (5) Kredit
2	Risiko Operasional	(6) Kepuasan pelanggan (7) Pengembangan produk (8) Kinerja dan efisiensi (9) Sumber (10) Tingkat keusangan persediaan (11) Kegagalan produk/jasa (12) Lingkungan (13) Keselamatan kerja (14) Penurunan merk produk
3	Risiko Pemberdayaan	(15) Kepemimpinan dan manajemen (16) <i>Outsourcing</i> (17) Insentif kinerja (18) Perubahan ketersediaan (19) Komunikasi
4	Risiko Pemrosesan Teknologi dan Informasi	(20) Integritas (21) Akses (22) Ketersediaan Insfrastuktur
5	Risiko Integritas	(23) Kebijakan manajemen risiko (24) Kecurangan manajemen dan karyawan (25) Tindakan ilegal (26) Reputasi
6	Risiko Strategik	(27) Pemindaian lingkungan (28) Industri (29) Portofolio bisnis (30) Pesaing (31) Penentuan harga (32) Valuasi (33) Perencanaan (34) Siklus hidup (35) Pengukuran kinerja (36) Pengaturan (37) Kedaulatan dan politik

Lampiran 3 Daftar Kantor Akuntan Publik

No	Member	Kantor Akuntan Publik
1	Pricewaterhouse Coopers (PwC)	Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan
		Prima Wahana Caraka
		Pricewaterhouse Coopers Indonesia Penasehat
		Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia.
2	KPMG	Siddharta Widjaja & Rekan
		Advisory Indonesia
		Siddharta Advisory
3	Ernst & Young (EY)	Purwantono, Suherman dan Surja.
4	Deloitte Touche Tohmatsu	Tax Solution (DTS)
		Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)
		PT Delloite Consulting

Lampiran 4 Uji Hipotesis

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.333	9	.037	6.169	.000 ^b
	Residual	.911	152	.006		
	Total	1.243	161			
a. Dependent Variable: ERM						
b. Predictors: (Constant), Moderasi 4, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Firm Size, Reputasi Auditor, Moderasi 2, Moderasi 3, KMR, Moderasi 1						

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.146		-.031	.975
	Firm Size	.029	.005	.509	5.551	.000
	Dewan Komisaris	.006	.002	.242	3.065	.003
	Komisaris Independen	-.043	.066	-.055	-.654	.514
	Reputasi Auditor	-.044	.017	-.246	-2.599	.110
	Komite Manajemen Risiko	.133	.441	.576	.302	.763
	Moderasi 1	-.008	.015	-1.015	-.519	.604
	Moderasi 2	.012	.005	.466	2.316	.022
	Moderasi 3	.279	.130	.567	2.150	.033
	Moderasi 4	.112	.038	.420	2.981	.003

Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,517 ^a	,268	,224	,077405

Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Coefficients ^a				
Model		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)			
	Firm Size	.374	.423	.400
	Dewan Komisaris	.180	.240	.212
	Komisaris Independen	.071	-.054	-.046
	Reputasi Auditor	.164	-.205	-.179
	Moderasi 1	.118	-.124	-.107
	Moderasi 2	.102	-.199	-.174
	Moderasi 3	.166	.177	.154
	Moderasi 4	.201	.234	.206
a. Dependent Variable: ERM				

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		162
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08020103
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.061
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^{c,d}

2. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	Firm Size	.702	1.424
	Dewan Komisaris	.970	1.031
	Komisaris Independen	.989	1.011
	Reputasi Auditor	.716	1.397

a. Dependent Variable: Pengungkapan Manajemen Risiko

3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 ^a	.268	.224	.077405	1.705

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Firm Size, Reputasi Auditor, KMR

b. Dependent Variable: ERM

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.151	.081		1.872	.063
	Firm Size	-.003	.003	-.093	-.904	.367
	Dewan Komisaris	.001	.001	.062	.705	.482
	Komisaris Independen	-.048	.036	-.124	-1.313	.191
	Reputasi Auditor	.000	.009	-.002	-.023	.982

Lampiran 6 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.146		-.031	.975
	Firm Size	.029	.005	.509	5.551	.000
	Dewan Komisaris	.006	.002	.242	3.065	.003
	Komisaris Independen	-.043	.066	-.055	-.654	.514
	Reputasi Auditor	-.044	.017	-.246	-2.599	.110
	Komite Manajemen Risiko	.133	.441	.576	.302	.763
	Moderasi 1	-.008	.015	-1.015	-.519	.604
	Moderasi 2	.012	.005	.466	2.316	.022
	Moderasi 3	.279	.130	.567	2.150	.033
	Moderasi 4	.112	.038	.420	2.981	.003

Lampiran 7 Analisis Statistik Deskriptif

1. Pengungkapan Manajemen Risiko

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
ERM	162	1.000	0.676	0.831	0.838	0.087
Valid N(Listwise)	162					

ERM					
	Interval	Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	0.676-0.716	14	8.6	8.6	Sangat Rendah
	0.717-0.757	36	22.2	22.2	Rendah
	0.758-0.798	14	8.6	8.6	Cukup
	0.799-0.839	28	17.3	17.3	Tinggi
	0.840-1.000	70	43.2	43.2	Sangat Tinggi
	Total	162	100.0	100.0	

2. Ukuran Perusahaan

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
Firm Size	162	31.867	25.216	28.342	28.142	1.540
Valid N(Listwise)	162					

Firm Size					
	Interval	Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	25.216-26.801	27	16.7	16.7	Kecil
	26.802-29.881	105	64.8	64.8	Menengah
	29.882-31.867	30	18.5	18.5	Besar
	Total	162	100.0	100.0	

3. Dewan Komisaris

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
DK	162	18.000	1.000	8.506	9.000	3.725
Valid N (Listwise)	162					

Dewan Komisaris					
Interval		Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	1-3	10	6,2	6,2	Tidak Sesuai Peraturan
	4-18	152	93,8	93,8	Sesuai Peraturan
	Total	162	100,0	100,0	

4. Dewan Komisaris Independen

	N	Maximum	Minimum	Mean	Median	Std. Deviation
DKI	162	0.833	0.250	0.430	0.400	0.112
Valid N (Listwise)	162					

Dewan Komisaris Independen					
Interval		Frequency	Percent	Valid Percent	Kategori
Valid	0.250-0,299	4	2,5	2,5	Di bawah 30%
	0,300-0,833	158	97,5	97,5	Di atas 30%
	Total	162	100,0	100,0	

5. Reputasi Auditor

Reputasi Auditor				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.000	93	57.4	57.4
	1.000	69	42.6	42.6
	Total	162	100.0	100.0

6. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.000	134	82.7	82.7
	1.000	28	17.3	17.3
	Total	162	100.0	100.0

Lampiran 8 Tabulasi Penelitian

Kode	Firm Size			Dewan Komsaris			Komisaris Independen			Reputasi Auditor			Komite Manajemen Risiko			Pengungkapan Manajemen Risiko		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
SMGR	31,420	31,522	31,566	36	10	11	0,286	0,286	0,286	1	1	1	1	1	1	0,784	0,838	0,838
WSBP	30,251	30,334	30,354	7	10	12	0,500	0,600	0,600	0	1	0	1	1	1	0,838	0,892	0,838
AMFG	29,337	29,466	29,763	4	6	7	0,333	0,286	0,333	1	1	1	1	1	1	0,757	0,757	0,757
ARNA	28,065	28,102	28,134	18	18	18	0,333	0,500	0,500	1	1	1	0	0	0	0,838	0,838	0,892
TOTO	28,579	28,670	28,695	2	2	18	0,400	0,400	0,400	1	1	1	1	1	1	0,973	0,946	0,946
BAJA	27,613	27,576	27,527	4	7	7	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,811	0,784	0,784
BTON	25,901	25,935	26,105	9	10	10	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,703	0,676	0,676
GDST	27,860	27,883	27,933	12	10	15	0,333	0,500	0,333	0	0	0	0	0	0	0,865	0,865	0,865
LMSH	25,816	25,806	25,799	9	9	9	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,676	0,676	0,676
AGII	29,397	29,488	29,525	11	10	10	0,333	0,333	0,333	0	0	0	1	1	1	0,757	0,784	0,784
BUDI	28,707	28,709	28,853	6	6	6	0,333	0,333	0,333	0	0	0	1	1	1	0,784	0,757	0,784
EKAD	27,278	27,404	27,472	6	7	3	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,730	0,730	0,757

INCI	26,319	26,440	26,693	5	5	9	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,757	0,757	0,757
SRSN	27,299	27,204	27,255	9	11	12	0,375	0,375	0,375	0	0	0	0	0	0	0,811	0,811	0,838
AKPI	28,593	28,641	28,753	6	6	4	0,333	0,333	0,333	1	1	1	0	0	0	0,865	0,865	0,865
APLI	26,474	26,711	26,944	18	24	24	0,500	0,333	0,333	1	1	1	0	0	0	0,676	0,676	0,676
IGAR	26,809	26,964	27,069	6	12	5	0,333	0,333	0,333	0	1	1	0	0	0	0,838	0,838	0,892
IMPC	28,453	28,462	28,494	6	6	6	0,333	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,838	0,838	0,838
TRST	28,822	28,835	29,086	11	14	14	0,500	0,333	0,333	1	1	0	0	0	0	0,811	0,811	0,811
YPAS	26,359	26,439	26,525	11	11	12	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,676	0,730	0,811
CPIN	30,818	30,818	30,818	9	9	9	0,500	0,333	0,333	1	1	1	0	0	0	0,730	0,757	0,757
JPFA	30,589	30,680	30,768	9	9	6	0,400	0,500	0,500	0	1	1	0	0	0	0,892	0,892	0,892
MAIN	28,997	29,035	29,098	5	4	4	0,600	0,600	0,600	0	1	1	0	0	0	0,784	0,811	0,838
SIPD	28,574	28,437	28,414	6	6	6	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,757	0,784	0,838
TIRT	27,428	27,479	27,551	10	10	10	0,500	0,500	0,333	0	0	0	0	0	0	0,730	0,730	0,757
KBRI	27,865	27,789	27,688	4	4	4	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,865	0,892	0,919
KDSI	27,764	27,915	27,961	9	10	9	0,500	0,500	0,333	0	0	0	0	0	0	0,865	0,865	0,892
SPMA	28,401	28,408	28,456	9	4	5	0,800	0,800	0,800	0	0	0	0	0	0	0,784	0,784	0,784

AMIN	26,016	26,254	26,612	5	6	12	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,865	0,865	0,865
ASII	33,199	33,320	33,474	6	6	6	0,333	0,500	0,300	1	1	1	0	0	0	0,892	0,892	0,892
AUTO	30,313	30,323	30,397	6	6	6	0,375	0,375	0,375	1	1	1	0	0	0	0,730	0,730	0,730
BOLT	27,818	27,804	27,903	3	3	6	0,500	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,730	0,892	0,919
IMAS	30,085	31,077	31,344	2	9	9	0,429	0,429	0,429	1	1	1	0	0	0	0,811	0,811	0,892
LPIN	26,893	26,315	26,432	12	12	8	0,333	0,333	0,667	0	0	0	0	0	0	0,730	0,757	0,784
SMSM	28,444	28,524	28,661	18	14	20	0,333	0,500	0,500	1	1	1	0	0	0	0,946	0,946	0,946
RICY	27,885	27,949	28,063	24	24	20	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,865	0,865	0,919
SSTM	27,232	27,130	27,055	6	8	8	0,400	0,400	0,400	0	0	0	0	0	0	0,784	0,784	0,811
UNIT	26,794	26,779	26,763	11	10	11	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,784	0,784	0,784
BATA	27,402	27,475	27,500	4	4	4	0,500	0,500	0,333	1	1	1	1	1	1	0,892	0,892	0,892
BIMA	28,648	25,216	25,310	4	4	4	0,667	0,667	0,667	0	0	0	0	0	0	0,730	0,730	0,730
JECC	30,396	28,288	30,667	9	8	6	0,667	0,667	0,500	0	0	0	0	0	0	0,892	0,892	0,892
ALTO	27,784	27,734	32,340	1	1	1	0,500	0,667	0,500	0	0	0	0	0	0	0,757	0,757	0,757
CEKA	27,986	27,962	27,787	10	9	9	0,500	0,500	0,500	1	1	1	0	0	0	0,838	0,838	0,838
DLTA	27,812	27,924	28,052	7	13	12	0,400	0,400	0,400	1	1	1	0	0	0	0,703	0,703	0,703

ICBP	33,298	33,387	33,471	12	12	12	0,500	0,500	0,500	1	1	1	0	0	0	0,892	0,892	0,892
INDF	34,342	34,410	34,504	12	12	12	0,375	0,375	0,375	1	1	1	0	0	0	0,892	0,892	0,892
MLBI	28,453	28,551	28,692	12	12	12	0,571	0,667	0,500	1	1	1	1	1	1	0,757	0,757	0,757
ROTI	28,702	29,148	29,111	12	12	12	0,333	0,333	0,333	1	1	1	0	0	0	0,865	0,865	0,865
ULTJ	29,075	29,277	29,346	9	9	9	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,919	0,919	0,919
GGRM	31,773	31,832	31,867	9	9	10	0,667	0,667	0,667	1	1	1	0	0	0	0,865	0,865	0,865
HMSP	28,212	31,395	31,473	11	10	9	0,250	0,400	0,333	1	1	1	0	0	0	0,946	0,946	0,946
RMBA	30,232	30,276	30,331	9	12	12	0,750	0,750	1,000	1	1	1	0	0	0	0,757	0,757	0,784
WIIM	27,934	27,835	31,473	11	12	10	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,973	0,973	0,973
DVLA	28,0572	28,126	28,151	4	1	1	0,429	0,429	0,429	1	1	1	0	0	0	0,757	0,757	0,757
INAF	27,954	28,056	27,997	22	20	20	0,333	0,333	0,333	1	0	0	1	1	1	0,757	0,757	0,757
KLBF	30,354	30,441	30,529	10	6	10	0,429	0,429	0,429	1	1	1	1	1	1	0,973	0,973	0,973
SIDO	28,715	28,781	28,836	9	10	10	0,333	0,333	0,400	0	1	1	0	0	0	0,946	0,946	0,946
ADES	27,366	27,457	27,505	4	6	6	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,946	0,946	0,946
KINO	28,820	28,806	28,910	8	8	16	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,973	0,973	0,973
TCID	28,413	28,490	28,525	10	14	13	0,400	0,400	0,400	1	1	1	0	0	0	0,892	0,892	0,892

UNVR	30,449	30,571	30,603	12	12	12	0,800	0,800	0,833	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000
CINT	26,713	26,890	26,920	12	12	12	0,500	0,500	0,500	0	0	0	0	0	0	0,973	1,000	1,000
KICI	25,664	25,730	25,761	4	4	4	0,333	0,333	0,333	0	0	0	0	0	0	0,676	0,676	0,676

